

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah serangkaian analisis yang telah dilakukan secara bertahap sesuai metode Robert Entman, peneliti menemukan hubungan dari tiap tahapan analisis. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada Bab 1 yang dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin berikut.

Pertama, praktek jurnalisme damai yang dilakukan oleh *SKH Kompas* dalam pemberitaan kasus Klaim Tari Pendet sebagai budaya Malaysia dilakukan dengan matang dimulai dari proses awal produksi berita. Penerapan jurnalisme damai yang masuk ke dalam *humanisme transidental SKH Kompas* wajib dilakukan oleh seluruh awak redaksi. Dalam kasus klaim Tari Pendet ini, *SKH Kompas* tidak mengeluarkan pemberitaan yang dapat semakin memicu emosi masyarakat Indonesia atas tindakan Malaysia. *SKH Kompas* justru lebih menampilkan situasi seni budaya Indonesia, kinerja pemerintah, dan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan Tari Pendet ini.

Peredaman masalah dilakukan oleh *SKH Kompas* karena *SKH Kompas* menyadari sudah ada kemarahan dalam diri masyarakat Indonesia terhadap Malaysia. Melalui penelitian ini peneliti melihat bahwa jurnalisme damai juga dapat diterapkan pada pemberitaan mengenai permasalahan budaya, tidak hanya permasalahan yang mengandung konflik fisik saja. Dalam kasus Tari Pendet ini, tidak ada konflik fisik antara dua negara, namun *SKH Kompas* merasa jurnalisme

damai patut diterapkan dalam pemberitaan karena kasus ini berpotensi menjadi sebuah konflik besar. Peredaman masalah melalui pemberitaan dimaksudkan *SKH Kompas* untuk meredakan kegeraman masyarakat Indonesia atas tindakan Malaysia yang telah menggunakan Tari Pendet dalam iklan pariwisatanya tanpa ijin terlebih dahulu.

Bahkan pada akhir-akhir pemberitaan *SKH Kompas* mengubah kata “*klaim*” menjadi “*penggunaan*” Tari Pendet untuk menginformasikan pada pembacanya bahwa dalam kasus Tari Pendet ini Malaysia tidak melakukan klaim, Malaysia hanya menggunakan Tari Pendet dalam iklan pariwisatanya, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir Tari Pendet akan “dirampas” Malaysia. Dalam pemberitaan, *SKH Kompas* baru menerapkan *cover both side* di berita-berita seputar penyelesaian, hal ini diakui oleh Kepala Desk Humaniora, bahwa *SKH Kompas* memang berusaha fokus pada situasi kebudayaan di dalam negeri yaitu mengajak masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia.

Kedua, *SKH Kompas* membagi *frame* pemberitaan menjadi tiga bagian besar yang saling berkaitan. *Frame* pertama adalah *SKH Kompas* memandang permasalahan klaim Tari Pendet merupakan permasalahan budaya yang serius dan membutuhkan perhatian pemerintah. *Frame* kedua, Penyelesaian masalah harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perdamaian di tingkat pemerintah saja. *Frame* ketiga, *SKH Kompas* mencermati bahwa dalam masyarakat Indonesia sudah terbentuk citra negatif atas Malaysia.

B. Saran

Dalam penelitian kasus klaim Tari Pendet sebagai budaya Malaysia ini peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan baik pada proses maupun hasil penelitian. Berikut adalah beberapa kekurangan yang peneliti sadari dapat menjadi pembelajaran pada penelitian selanjutnya, terutama penelitian mengenai framing media dan penelitian bertema jurnalisme damai.

Peneliti menyadari bahwa analisis teks yang telah dilakukan dengan menggunakan perangkat framing Robert Entman tidak sempurna. Hal ini dikarenakan perangkat yang peneliti pakai tidak bersumber langsung dari tulisan Robert Entman sendiri, namun dari buku Eriyanto yang memungkinkan adanya perubahan dalam pemaknaan keempat perangkat framing Robert Entman. Pada penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar peneliti lainnya menggunakan sumber langsung dari pencipta perangkat framing yang akan digunakan untuk menghindari perbedaan pemaknaan dalam menganalisis teks berita.

Peneliti menyadari bahwa untuk melihat penerapan jurnalisme damai dalam sebuah media membutuhkan *time frame* yang panjang. Dalam kasus klaim Tari Pendet, peneliti hanya membatasi *time frame* pemberitaan selama Agustus-September 2009. Pada penelitian mendatang, penelitian mengenai jurnalisme damai ada baiknya jika tidak hanya melihat dari satu kasus saja namun dari berbagai permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan semakin banyak kasus yang diteliti, akan semakin terlihat bagaimana media tersebut membingkai peristiwa-peristiwa konflik antara Indonesia-Malaysia

dan bagaimana media tersebut menerapkan jurnalisme damai dalam pemberitaannya.

Selain itu kelemahan dari penelitian ini adalah melihat penerapan jurnalisme damai dalam kasus Tari Pendet hanya dari satu media saja yaitu *SKH Kompas*. Pengetahuan mengenai bagaimana jurnalisme damai diterapkan dalam media akan lebih banyak didapatkan jika penelitian yang dilakukan adalah membandingkan hasil penelitian di *SKH Kompas* dengan media lain di Indonesia atau media Malaysia, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan detail.

Peneliti mengharapkan pada masa mendatang semakin banyak media di Indonesia yang menerapkan jurnalisme damai baik media lokal maupun media nasional. Sebab jurnalisme damai tidak hanya dapat diterapkan dalam peliputan konflik fisik saja, namun juga dalam permasalahan yang mempunyai potensi untuk menjadi konflik fisik. Pers sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat sebaiknya tidak memberitakan peristiwa konflik karena mengejar kenaikan oplah media saja. Pers juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah dengan bersikap kritis dan juga memberikan saran-saran yang dapat menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anto,J dan Pemilianna Pardede. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan KIPAS.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*, Yogyakarta : LkiS.
- Nadhya Abrar, Ana. *Penulisan Berita Edisi Kedua*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Pawito, Ph.D. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta : LkiS.
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Sularto, St. 2007. *Kompas, Menulis Dari Dalam*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Susilo, Taufik Adi. 2009. *Indonesia vs Malaysia : Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta : Garasi.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *JURNALISME DAMAI Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*, Yogyakarta : P_IDEA.

JURNAL:

Eriyanto dan Muhammad Qodari dalam *Riset Utama: Petaka Maluku (5)– Mempertimbangkan Jurnalisme Perdamaian*. Majalah Pantau edisi 09/ Tahun 2000. Jakarta: Institusi Studi Arus Informasi.

WEBSITE :

_____.2009. *Soal Klaim Tari Pendet RI-Malaysia Diminta Cooling Down*. Artikel Online (<http://melayuonline.com/ind/news/read/9400/soal-klaim-tari-pendet-ri-malaysia-diminta-cooling-down>). Tanggal akses 18 Oktober 2009. Waktu akses 22:38 WIB.

Padmawiryanta, W. B. 2009. *Perspektif Hindu Dalam Tari Bali Dan Tari Pendet*. Artikel Online. (http://oase.kompas.com/read/xml/2009/09/18/01583199/perspektif_hindu.dalam.tari.bali.dan.tari.pendet). Tanggal Akses 17 Oktober 2009. Waktu akses 16:21 WIB.

Pontoh, Coen Husain. 2007. *Amanat Hati Nurani Karyawan*. Artikel Online. (<http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/amanat-hati-nurani-karyawan.html>). Tanggal akses 18 Oktober 2009. Waktu akses 22:51 WIB.

_____.2009. *Iklan Tari Pendet Bukan Buatan Pemerintah Malaysia*. Arrtikel Online (<http://www.antara.co.id/berita/1251119880/iklan-tari-pendet-bukan-buatan-pemerintah-malaysia>). Tanggal akses 17 Oktober 2009. Waktu akses 16:15 WIB.

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=&submit.x=12&submit.y=15&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunke%2Fs1%2Fikom%2F2008%2Fjiunkpe-nss12008_5140411_6-918_9-

[kompas_2007-chapter4.pdf](#). Tanggal akses 17 Oktober 2009. Waktu akses 17:55 WIB .

_____,2009. *Seni Budaya Cermin Besar Tari Pendet*. Artikel Online (<http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/23/seni-budaya-cermin-besar-tari-pendet>) Tanggal akses 16 10 Oktober 2009. Waktu akses 15:32.WIB



INTERVIEW GUIDE

Kepala Desk (pertanyaan pribadi):

1. Bagaimana kisahnya sampai Anda bisa bergabung di SKH Kompas dan kini menjabat sebagai KaDesk Humaniora?
2. Sebagai kepala desk humaniora, apa saja yang menjadi job desk anda?
3. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH Kompas?
4. Adakah ideologi SKH Kompas yang ditanamkan/diterapkan dalam benak anda sebagai salah satu pekerjanya? Ideologi seperti apa? Apakah anda setuju dengan ideologi tersebut?
5. Apa saran dan kritik anda secara umum yang dapat anda berikan untuk SKH Kompas, khususnya dalam menghadapi peristiwa konflik?
6. Menurut anda apa hambatan dan tantangan bagi SKH Kompas sebagai media nasional yang mempunyai nama besar dan terkenal dengan jurnalisme kepinginya?

Pertanyaan Seputar Redaksi Skh Kompas

1. Seperti apa alur proses produksi berita di SKH Kompas mulai dari pra hingga pasca peliputan?
2. Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? Bagaimana sistemnya?
3. Bagaimana kebijakan redaksional dalam penyeleksian dan penentuan rubrik sebuah berita? Misal : apa perbedaan kategori rubrik Pendidikan & Kebudayaan dengan rubrik Politik & Hukum?
4. Dalam berita-berita mengenai klaim Tari Pendet saya perhatikan sebgain besar berita masuk dalam desk Pendidikan&Kebudayaan atau Politik&Hukum. Setelah saya mengajukan permohonan wawancara mengenai topik ini kepada SKH Kompas, saya dimasukkan kedalam desk Humaniora. Mengapa bisa seperti ini pak? Apakah ada alasan khusus?
5. Apa yang menjadi pakem dalam pemberitaan SKH Kompas?
6. Kriteria apa yang dipakai oleh SKH Kompas dalam menentukan berita mengenai klaim Tari Pendet itu layak terbit?
7. Apa yang melatarbelakangi SKH Kompas mengangkat kasus klaim tari Pendet ini sebagai sebuah isu yang penting? Mengapa SKH Kompas sampai membuat sebuah jajak pendapat pembaca mengenai permasalahan budaya?
8. Pada artikel-artikel yang dikeluarkan, SKH Kompas sering menyebut Tari Pendet sebagai *kesenian daerah*, namun pada artikel lain disebutkan bahwa Tari Pendet merupakan *produk budaya*. Menurut anda bagaimana SKH Kompas memandang Tari Pendet ?
9. Bagaimana SKH Kompas memposisikan diri terkait kasus ini?Apakah kasus ini dipandang sebagai masalah kebudayaan dalam negri atau masalah konflik antar negara?
10. Menurut SKH Kompas siapa yang mempunyai andil dan kepentingan dalam kasus ini?
11. Kecenderungan dalam pemberitaan, SKH Kompas banyak membahas tentang pemerintah Indonesia, namun juga dikesankan bahwa pemerintah mempunyai andil

- yang besar dalam menyebabkan produk budaya Indonesia diklaim oleh pihak lain, mengapa demikian?
12. Menurut SKH Kompas, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan budaya & konflik dengan Malaysia?
 13. Mengapa SKH Kompas jarang memberitakan mengenai keadaan yang terjadi di Malaysia terkait kasus ini? Karena saya perhatikan SKH Kompas baru memberitakan dari pihak Malaysia dan mengambil narasumber Malaysia sejak adanya peristiwa pemanggilan Dubes RI di Malaysia oleh Kementerian Malaysia.
 14. Apa maksud dari redaksi terhadap ungkapan bahwa Malaysia merupakan bangsa yang kekurangan identitas (Kompas 23-08-2009, *Bung Karno Mendukung Pemassalannya...* –paragraf 1)?
 15. Mengapa terdapat perbedaan dalam pemberitaan seputar kasus ini, diawal SKH Kompas menggunakan “Klaim Tari Pendet” sedangkan diakhir-akhir berita SKH Kompas lebih sering menggunakan “Penggunaan Tari Pendet”?
 16. Apa yang mendasari SKH Kompas mencantumkan ilustrasi daftar budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain pada artikel berjudul “*Perlindungan Budaya Lemah (31/08/09)*” ?
 17. Bagaimana pandangan SKH Kompas mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik?
 18. Bagaimana sikap SKH Kompas dalam memperlakukan berita mengenai konflik khususnya konflik budaya dalam kasus Tari Pendet? Apakah ada perlakuan khusus?
 19. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai?
 20. Pendiri SKH Kompas, Bapak Jakob Oetama pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang komunikasi karena menawarkan jurnalisme damai dalam pers Indonesia. Apakah peristiwa ini juga mempengaruhi SKH Kompas dalam menggunakan jurnalisme damai dalam pemberitaan seputar Tari Pendet?

INTERVIEW GUIDE

WARTAWAN

A. Seputar Latar Belakang Narasumber

1. Sudah berapa lama di SKH Kompas & jabatan apa saja yang pernah dipegang ?
2. Bagaimana ceritanya anda bisa bekerja di SKH Kompas?
3. Berita apa saja yang pernah anda liput? Dan daerah mana saja yang pernah menjadi area penugasan anda?
4. Sebelum peliputan di lapangan, apakah ada pelatihan mengenai pakem SKH Kompas dan “pesan-pesan” tertentu yang harus dilakukan dan ditaati?
5. Ketika bekerja di SKH Kompas, apakah anda merasa diberi kebebasan dalam menulis, artinya tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan SKH Kompas terhadap tulisan anda (pemotongan artikel) untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan perusahaan?

6. Apakah pernah tulisan yang telah anda bikin tidak dimuat oleh SKH Kompas? Apa alasannya?
7. Dalam SKH Kompas, apa alasan tulisan anda dikatakan layak untuk naik cetak (selain 5W+1H) ? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berkaitan dengan ideologi SKH Kompas?

B. Seputar Kasus Tari Pendet

1. Apa yang anda ketahui mengenai hubungan Indonesia dengan Malaysia?
2. Bagaimana pendapat anda pribadi terhadap adanya peristiwa klaim tari Pendet dengan digunakannya Tari Pendet dalam iklan pariwisata “Enigmatic Malaysia”?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah mengenai *Eminent Person Group* (EPG) untuk menyelesaikan masalah klaim tari Pendet? Apakah merupakan langkah tepat atau hanya meredam isu?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja pemerintah dalam menangani kasus ini?
5. Setelah berbagai solusi dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah, Bagaimana anda melihat kedepannya antara hubungan Indonesia-Malaysia?
6. Harapan dan solusi apakah menurut anda yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini?
7. Dalam peliputan berita, apa yang menjadi pertimbangan anda dalam pemilihan narasumber? Apakah anda mencari sendiri (inisiatif atau berdasarkan keputusan dalam rapat redaksi)?
8. Dalam satu artikel terkadang dibuat oleh beberapa wartawan (saya melihat dari kode wartawan yang tercantum di akhir berita), apakah ini berarti artikel ini diliput oleh Tim yang dibentuk secara khusus?
9. Bagaimana pengaturan lapangan mengenai cara kerja tim?
10. Bagaimana pandangan anda mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik?
11. Bagaimana sikap anda dan editor anda dalam memperlakukan berita mengenai konflik khususnya konflik budaya dalam kasus Tari Pendet?
12. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai?

HASIL WAWANCARA

Wakil Kepala Desk Kompas Minggu, Putu Fajar Arcana

Tanggal : 21 Maret 2011

Tempat : Kantor Redaksi SKH Kompas lantai 5

1. Sudah berapa lama di SKH Kompas & jabatan apa saja yang pernah dipegang ?

Saya sejak 1994 sampai sekarang itu berarti hampir 15 tahun. Saya pernah jadi wakil kepala biro di Jogja selama 3 tahun. Lalu sekarang wakil kepala desk Kompas minggu.

2. Bagaimana ceritanya anda bisa bekerja di SKH Kompas?

Sejak awal memang cita-citanya jadi penulis. Saya pikir kalau nulis lepas itu kan jaminan hidupnya tidak tentu. Tapi harus bisa nulis. Wartawan itu kemudian menjadi pilihan kemudian, karena harus menjamin hidup untuk keluarga lalu pilihannya jatuh ke jurnalistik. Buat saya waktu itu jurnalistik belum ada TV seperti sekarang. Jurnalistik yang benar saat itu bagi saya cuma ada dua, yaitu koran dan majalah. Majalah itu ya Tempo. Kalau harian itu ya Kompas. Dan dua-duanya saya jalani. Tahun 1992 sampai 1994 saya di majalah Tempo, koresponden Denpasar. Dibredel, kemudian saya masuk ke Kompas.

3. Kalau dikompas berarti sudah hampir menulis semua jenis berita?

Iya, karena dulu saya koresponden di daerah, jadi harus menguasai semua bidang.

4. Sebelum peliputan di lapangan, apakah ada pelatihan mengenai pakem SKH Kompas dan “pesan-pesan” tertentu yang harus dilakukan dan ditaati?

Kita berbicara mingguan ya, kalau harian itu kan setiap hari ada brain storming di rapat pagi, apa saja yang harus dilakukan, itu para editor, kemudian ada rapat sore. Rapat pagi itu kan di agendakan peliputan hari ini, itu disebarkan kepada para editor, editor meneruskan ke

reporter jadi reporter tidak harus datang ke sini. Pemberitahuan ini sudah dengan apa yang kita butuhkan untuk besok. Intinya dalam rapat pagi itu sudah dibahas apa yang akan dikembangkan, ke arah mana, siapa narasumbernya itu sudah ada pakemnya. Nah kalau harian itu ada evaluasi setiap hari Rabu, itu editor semua kumpul membahas semua persoalan yang kira-kira tidak hanya soal liputan tapi juga kepegawaian termasuk kritik. Kalau mingguan itu biasanya Sabtu sore kita rapat, dan membicarakan apa yang akan kita liput dalam 2 minggu kedepan. Hasil rapat kemudian diturunkan dalam TOR sebagai pegangan kita untuk ke lapangan.

5. *Ketika bekerja di SKH Kompas, apakah anda merasa diberi kebebasan dalam menulis, artinya tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan SKH Kompas terhadap tulisan anda (pemotongan artikel) untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan perusahaan?*

Saya diberikan ruang yang cukup terbuka untuk berekspresi. Cuma memang Kompas sendiri punya etika, ya seperti etika biasa, yang umum seperti SARA. Tidak pernah ada suatu berita dilarang karena dia menjadi kliennya Kompas. Kita tetap berpegang teguh pada kebenaran yang ada di lapangan, tidak pernah ada intervensi dari editor. Kalau ada fakta-fakta kebenaran di lapangan itu harus disampaikan. Editor tidak boleh memasukkan kepentingan diluar kepentingan jurnalisme untuk mengintervensi kebenaran di lapangan. Dalam posisi ini wartawan dan editor punya posisi yang sama dalam mempersoalkan dan mendiskusikan suatu peristiwa. Tidak pernah ada editor itu menjadi atasan lalu dia berhak memaksa itu tidak boleh.

6. *Apakah pernah tulisan yang telah anda bikin tidak dimuat oleh SKH Kompas? Apa alasannya?*

Oh sering, paling sering itu karena alasan halaman. Apalagi kalau responden, kan halamannya itu penampungan responden itu di halaman nusantara, kalau dipotong iklan biasanya tinggal 2 halaman, biasanya emang ditolak karena berebut halaman.

7. Dalam SKH Kompas, apa alasan tulisan anda dikatakan layak untuk naik cetak (selain 5W+1H) ? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berkaitan dengan ideologi SKH Kompas?

Ada, di Kompas itu menganut ideologi ada humanisme transidental. Humanisme transidental ini dia lintas kultural, agama dan etnis. Tidak pernah lintas agama, etnis ini menjadi pertimbangan dasar atau utama untuk memuat atau tidak memuat sebuah pemberitaan. Fungsi redaksional itu mengatasi sekat-sekat agama, etnis, wilayah dalam keseharian kita. Perjuangan humanisme itu pada perjuangan kemanusiaan. Itu dasar betul dan semua wartawan Kompas itu harus memiliki ini.

8. Bagaimana pendapat anda pribadi terhadap adanya peristiwa klaim tari Pendet dengan digunakannya Tari Pendet dalam iklan pariwisata “Enigmatic Malaysia”?

Kebudayaan itu kan sebenarnya dinamika yang bergerak terus menerus. Dia sebenarnya lintas wilayah, tidak pernah dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Itu bisa terjadi dimana-mana. Entah itu bentuknya diaspora seperti kultur Cina yang ada dimana-mana. Bali juga begitu. Jawa juga begitu. Itu membuktikan bahwa kebudayaan itu lintas geografis. Karena dia sifatnya begitu maka lentur terhadap waktu, waktu itu menjadi timeless bagi kebudayaan, dia bisa menyesuaikan diri di tempat-tempat dimana kebudayaan itu tumbuh. Ada sinergi dimana dia menyerap kultur lokal, kemudian tumbuh menjadi kebudayaan hibrida, yaitu sinergi dari berbagai kultur yang menjadi 1 identitas etnis itu. Bali itu juga seperti itu. Bali itu percampuran dari Tiongkok, Cina, India, Mesir, Arab, Kolonial kemudian Jawa yang paling dominan. Melayu dan Bugis juga masuk kemudian menjadi bentuk Bali seperti itu. Tidak pernah steril terhadap pengaruh sebenarnya. Kalau kita membicarakan Pendet dalam hal ini

seolah-olah kan dia bisa tumbuh dimana-mana kalau kita memakai frame ini. Ada hal yang menjadi problematik kemudian kalau kita mengambil satu bagain yaitu Pendet lalu memakai itu untuk tujuan-tujuan komersial. Tujuan-tujuan diluar itu juga, tujuan untuk membuat identitas baru. Pendet sudah terlanjur menjadi identitas dan lahir di bali. Tarian ini berlanjut. Kalo dia cuma diambil dalam masalah kultur entah pakaiannya, cara menarinya oleh seseorang atau 1 kelompok tertentu atau negara tertentu itu menurut saya, apalagi untuk tujuan iklan itu seharusnya ada batas-batas etika yang mestinya dihormati. Harusnya yang mengambil itu tahu etikanya kalo mengambil untuk tujuan komersial itu secara etika berarti pencurian. Tapi kalau itu diambil dan disinergikan untuk menjadi kebudayaan baru itu sah-sah saja seperti kebudayaan Cina.

9. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah mengenai Eminent Person Group (EPG) untuk menyelesaikan masalah klaim tari Pendet? Apakah merupakan langkah tepat atau hanya meredam isu?

Saya tidak pernah mendengar peran mereka yang dominan saat menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya lembaga-lembaga ini penting, namun maksimalisasi terhadap perannya itu harus jelas persoalan apa yang harus diselesaikan. Tapi sejauh ini apakah berhasil? Dia mungkin menyelesaikan secara diplomatik, dan itu selesai. Tapi ada pengerasan secara psikologis terhadap masyarakat Indonesia, bagaimana orang-orang Indonesia dalam manghadapi kemarahan dan kegeraman, ekspresi terhadap hal-hal yang terjadi.

10. Berarti menurut Mas EPG itu hanya untuk meredam isu?

Mungkin begitu, seolah-olah ada keinginan baik dari pemerintah. Ini kan persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara politik sebenarnya karena dia menyangkut etika. Mungkin pada tingkat politik itu selesai, tapi pada tingkat di bawah, masyarakat itu tidak selesai. Masyarakat tetap marah. Mereka tetap tidak suka dengan hal-hal yang berbau Malaysia. Contohnya

Petronas di Jakarta itu tidak laku. Ini tidak mungkin dihapus, saya gak ngerti gimana caranya proses rekonsiliasi kultural sehingga masyarakat tidak benci pada Malaysia. Ini tidak dihubungkan saat orba, ini sudah masa damai. Tapi kebencian itu kan mudah untuk disulut, bukan kebencian untuk perang. Mungkin banyak hal yang jadi penyebab, TKW kita dan banyak perlakuan tidak manusiawi, org Indonesia berkunjung dan diperlakukan beda itu pemicu.

11. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja pemerintah dalam menangani kasus ini?

Saya ngomong umum yah. Ni kan lagi menggerakkan koin sastra, sesungguhnya kita ada departemen kebudayaan. Betapa sebenarnya kita tidak serius dalam menganggap kebudayaan sebagai sebuah identitas yang dapat mengangkat martabat bangsa. Disitu kita tidak serius, mengapa? Peletakan penggabungan budaya dengan pariwisata itu sudah menunjukkan bagaimana pandangan kita dengan kebudayaan kita sendiri. Menggabungkan hal itu menjadi pertanda bahwa perspektif kita memandang itu hanya dari sisi potensi komersial yang bisa kita ambil dari kebudayaan. Seolah-olah kebudayaan itu menjadi investasi kultural yang bisa bermanfaat bagi industri pariwisata. Itu cara pandang kita yang sangat sederhana. Mereka lupa bahwa kebudayaan itu membawa sebuah identitas yang dapat mengangkat martabat bangsa. Kita lalai terhadap kebudayaan. Bali itu bisa dicontoh, dengan institusi-institusi yang ada berhasil melakukan proses dimana kebudayaan dan tradisi masih eksis tapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi orang lokal, tentu walaupun ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Di Bali dari masyarakatnya, bukan pemerintahnya yang bertindak seperti itu.

12. Setelah berbagai solusi dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah, Bagaimana anda melihat kedepannya antara hubungan Indonesia-Malaysia?

Menurut saya seperti ini tetap, karena tidak ada kesamaan pandangan seperti yang saya sebut tadi bahwa kebudayaan itu lintas geografis. Kalau itu diperdalam sampai ke bawah, tidak hanya pada tataran elit bahwa Melayu itu tumbuh di Malaysia tapi juga di Indonesia. Jadi jangan salah jika tiba-tiba ada tarian Melayu di Indonesia itu diakui di Malaysia. Nah itu harus diselesaikan dengan sikap-sikap dan cara yang lebih kultural, lebih menghargai unsur kemanusiaan bukan tinjauan politis. Kerjasama kebudayaan, pertukaran kebudayaan dua negara ini harus lebih sering dilakukan. Tanpa target bahwa ini menjadi diplomasi-diplomasi, kalo dibebani target diplomasi ini dia menjadi politis. Harus ada silaturahmi yang tetap dijalin oleh dua negara yang bertetangga.

13. *Itu kan kebudayaan Melayu, kalo tari Pendet gimana Mas?*

Secara diplomatis politis itu tadi saya bilang adalah pencurian. Pemerintah yang mencuri itu seharusnya punya niat baik untuk secara politis minta maaf kepada negara yang memiliki kebudayaan itu secara sah. Nah luka itu tidak segera tumbuh karena penyelesaian-penyelesaian politis. Ada persoalan besar yang bisa diselesaikan dengan cara lebih ramah. Misalnya Malaysia memberi beasiswa pada orang Indonesia untuk belajar budaya di sana. Atau Malaysia mengirimkan orang-orangnya untuk belajar tari di Bali. Itu kan cara-cara yang bersahabat dan bertetangga yang baik. Kalau itu dilakukan akan muncul pengertian yang membuat kita merasa bahwa kita ini bersaudara, dengan cara-cara yang menghargai satu sama lain, etikanya harus dijaga.

14. *Dalam pemberitaan, dikatakan pemerintah Malaysia mengatakan bahwa adanya tari Pendet dalam iklan itu merupakan sebuah kekhilafan yang dibuat oleh Discovery channel, apakah pernyataan pemerintah Malaysia ini sudah cukup menurut anda?*

Tidak cukup. Sebetulnya ada agen-agen di Malaysia yang menjadi agen terhadap institusi luar di dunia-dunia broadcast televisi periklanan yang membutuhkan materi-materi iklan atau materi tayangan kehidupan masyarakat. Nah disitu kita kalahnya. Justru untuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara itu adanya di Malaysia, di Indonesia hanya satu dua. Nah ketika channel-channel asing itu butuh tayangan tertentu tentang Asia atau Indonesia, mereka menghubungi agen-agen di Malaysia. Agen Malaysia, karena dia agen swasta, kepentingan komersial, tanpa ada campur tangan pemerintah ya mereka bergerak saja. Pemerintah Malaysia juga tidak melihat bahwa agennya ini bergerak dan mengambil porsi kebudayaan orang lain dan menjadikannya tayangan komersial. Saya menduga ini yang terjadi sebenarnya. Ini bukan pemerintah Malaysia, dan ini berbeda sekali. Bukan pemerintah Malaysia ini merestui. Tapi perusahaan-perusahaan ini dasarnya asas bisnis, tidak ada ideologi kultural, mengharapkan mereka punya etika untuk tidak mengambil itu bukan urusan mereka. Nah itu yg terjadi. Nah kalau pemerintah Malaysia merasa kalau itu kekhilafan, menurut saya itu hanya omongan di media saja, untuk meredam, tapi tidak menyelesaikan masalah. Akan terulang karena agen-agen itu bergerak terus. Kapan hari itu saya melihat ada tayangan batik di chanel asing dan itu batik Malaysia, orang-orang Cina yang membatik.

15. Dalam peliputan berita, apa yang menjadi pertimbangan anda dalam pemilihan narasumber? Apakah anda mencari sendiri (inisiatif atau berdasarkan keputusan dalam rapat redaksi)?

Wartawan tetap punya kebebasan, rapat itu hanya menjadi guidance di lapangan. Kalau dia punya narasumber lain yang lebih kompeten, dia harus mencari itu, apalagi itu menyangkut peristiwa kejadian penting, dia harus mendapat narasumber yang syahih.

16. Dalam satu artikel terkadang dibuat oleh beberapa wartawan (saya melihat dari kode wartawan yang tercantum di akhir berita), apakah ini berarti artikel ini diliput oleh Tim yang dibentuk secara khusus?

Pertimbangannya itu karena yang nulis 10 orang misalnya, jadi hanya dipersingkat saja. Tapi semua itu jalan liputan, tapi kita tidak bisa berharap bahwa berita yang ditulis itu dimuat semua. Bisa saja itu bagiannya dipotong.

17. Bagaimana pandangan anda mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik?

Saya tidak terlalu mendalami itu ya, tapi begini dasarnya yang selalu saya pegang itu keseimbangan. Buat saya itu sudah menjadi guideline untuk yang namanya jurnalisme damai, itu sebenarnya perumusan awal. Contohnya kita berpegang teguh untuk tidak memicu konflik baru dalam peristiwa perang. Asas keberimbangan itu metode yang klasik, tapi menurut saya paling ampuh untuk jadi pegangan liputan yang objektif. Pada suatu liputan terkadang ada keberpihakan, ini sering disalah artikan bahwa kita berpihak pada satu pihak, bukan itu maksudnya. Keberpihakan itu maksudnya kita berpihak pada kebenaran, kebenaran itu sesuatu yang abstrak, tapi dalam satu bagian dan elemen-elemen yang ada kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kita harus berpihak pada kebenaran. Kalo di Kompas itu ya kita berpihak pada hati nurani rakyat. Penerjemahannya di lapangan adalah rakyat kebanyakan. Walaupun pada suatu saat tertentu kita tidak harus berpihak pada orang banyak kalo dalam investigasi ternyata itu salah, tetap kita berpegang dan berpihak pada kebenaran. Itu menurut saya yang menjadi dasar dari jurnalisme damai.

18. Bagaimana cara mas menjaga keobjektifitas berita padahal mas adalah orang Bali tapi juga menulis tentang kasus tari Pendet ini?

Itu harus, profesionalisme. Itu dijadikan peluru saja buat saya untuk menggali lebih jauh, tapi tidak boleh digunakan untuk memunculkan rasa dendam dan ingin membalas apa yang sudah dilakukan pihak lain oleh kita. Kita harus memunculkan sikap profesional bahwa kita ini

bekerja. Bahwa kemudian ada subjektifitas ini bagi saya itu menjadi peluru untuk misalnya mengejar pihak-pihak tertentu untuk berbicara.

19. Menurut mas permasalahan ini termasuk masalah konflik bukan?

Dia memasuki ranah hukum dan etika. Ranah hukum dalam pengertian karena dia menyangkut etika kultural dan etika bisnis. Yang saya maksud itu karena ini diambil oleh perusahaan-perusahaan Malaysia yang menjadi agen dari perusahaan asing yang membuat tayangan tentang kebudayaan Melayu. Kalau dia etika bisnis itu memasuki ranah hukum, ada hak cipta, dia harusnya mempertimbangkan hal itu sebelum menyangkannya menjadi tayangan komersial. Mengapa itu hak cipta, karena itu kan sebenarnya hak cipta masyarakat bali secara kolektif. Tapi dalam etika kultural itu sudah menjadi persoalan negara. Seharusnya dia dipakai menjadi pertimbangan kultural sebelum dipakai menjadi sebuah tayangan iklan. Dua hal itu sebenarnya seharusnya ada pertimbangan kultural yang seharusnya kita jaga sebagai bangsa yang bertentangan, pemerintah ya mesti aktif.

20. Jadi menurut mas kasus ini belum dikategorikan sebagai konflik tapi bisa menjadi konflik?

Konfliknya bukan dalam pengertian konflik perang atau konfrontasi, tapi dalam suatu masa tertentu itu bisa menjadi pemicu. Ada sentimen yang mudah terpicu. Bentuknya sekarang tidak dalam konfrontasi tapi dalam bentuk diskriminasi, contohnya Petronas itu yang tidak laku. Produk Malaysia seperti dibenci. Anak saya pun jadi tahu, dia tahu Malaysia yang suka mencuri-curi. Apalagi dia suka bola, dan itu plesetan-plesetan Malaysia, ini sudah dia mulai dari kecil. Sumber konflik Indonesia dan Malaysia itu kan sumber konfliknya tidak jelas. Sukarno jaman dulu mengenai wilayah, apakah benar seperti itu? Jangan-jangan itu hanya untuk menarik perhatian rakyatnya dengan Ganyang

Malaysia karena tahu kekuasaannya mulai melemah, kemudian berusaha menyatukan kekuatan.

21. Apakah ada pelatihan jurnalisme damai di SKH Kompas?

Pembekalan 3 bulan termasuk peace jurnalisme. Di godog dulu 3 bulan didalam kelas, semua dianggap nol/kosong walaupun dia sudah pernah kerja di media lain. Kita panggil guru-guru dari mana-mana. Guru-guru pakar jurnalisme, desk per desk itu mengajar, peace jurnalisme itu biasanya mbak Maria Hartiningsih yang mengajar tentang materi-materi itu. Kemudian di kelas itu juga ada belajar menulis, diputar film kemudian mereka disuruh menulis. Baru kemudian turun kelapangan untuk magang, belum kerja, itu baru magang dititipkan di tiap desk gitu saja. Kita ada bagian diklat yang mengurus itu, jadi sistematikannya jalan.

22. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai?

Ideologinya kan uda jelas, menurut saya kalau dengan ideologi itu jurnalisme damai sudah masuk dalam humanisme transidental. Bagaimana kita bisa menyatakan kalau itu humanisme transidental kalau kita tidak melaksanakan jurnalisme damai. Tidak berpihak pada satu kelompok sudah jelas, melintasi batas-batas etnis sudah jelas, multikultural.

HASIL WAWANCARA

Via email dengan Kadesk Humaniora, Pak Try Harijono

1. Sebagai kepala desk humaniora, apa saja yang menjadi job desk anda?

Kepala Desk Humaniora menangani bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desk Humaniora dibantu dua wakil kepala desk.

2. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH Kompas?

Kinerja dan sinergi yang berlangsung di harian Kompas berjalan baik, karena antar bagian harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Desk tidak mungkin berjalan sendiri, tetapi menjalin kerjasama dengan desk-desk lainnya. Misalnya, untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah, Desk Humaniora bekerja sama dengan Desk Nusantara yang mengkoordinir teman-teman wartawan di daerah. Hal serupa kami jalin dengan desk lainnya seperti politik dan hukum, desk ekonomi maupun desk investigasi. Kerjasama antar desk ini untuk melengkapi bahan tulisan, sehingga berita atau tulisan yang disajikan kepada pembaca bisa lengkap, komprehensif dan akurat.

3. Adakah ideologi SKH Kompas yang ditanamkan/diterapkan dalam benak anda sebagai salah satu pekerjanya? Ideologi seperti apa? Apakah anda setuju dengan ideologi tersebut?

Ideologi yang ditanamkan kepada setiap wartawan dan karyawan Kompas adalah kemanusiaan berlandaskan Ketuhanan dan kejujuran. Artinya, tidak ada sekat-sekat berdasarkan golongan, agama, ras maupun etnis dalam menjalankan pekerjaan. Semuanya mengabdikan dan berbuat seoptimal mungkin untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kompas menanamkan kejujuran sebagai hal yang paling utama. Tidak ada kompromi dan diskusi lagi soal kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat mutlak dan harus dijunjung tinggi, baik dalam tutur kata, perbuatan dan termasuk soal keuangan.

4. Apa saran dan kritik anda secara umum yang dapat anda berikan untuk SKH Kompas, khususnya dalam menghadapi peristiwa konflik?

Kompas senantiasa berupaya untuk meredam dan mendinginkan konflik. Karena berita-berita yang disajikan tidak boleh provokatif, tendesius dan memihak suatu golongan. Berita yang disajikan, haruslah mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan negara, termasuk tidak menimbulkan konflik.

5. Menurut anda apa hambatan dan tantangan bagi SKH Kompas sebagai media nasional yang mempunyai nama besar dan terkenal dengan jurnalisme kepitingnya?

Jurnalisme haruslah dibangun dengan kejujuran, obyektif dan tidak memihak. Meski demikian, dalam sejumlah kasus terutama yang berbau SARA (suku, agama ras, dan antargolongan), penyajiannya haruslah hati-hati dan sangat bijaksana. Berita berbau SARA, masih sangat sensitif di masyarakat kita, sehingga dalam kasus-kasus yang berbau SARA penyajian berita harus mempertimbangkan banyak aspek sehingga media tidak menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat. Media haruslah mendewasakan masyarakat.

Pertanyaan Seputar Redaksi Skh Kompas

1. Seperti apa alur proses produksi berita di SKH Kompas mulai dari pra hingga pasca peliputan?

Proses produksi berita di SKH Kompas dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena itu berita-berita yang akan disajikan, harus melalui rapat editor. Alur produksinya, :

- 1). setiap pagi para editor desk melakukan rapat perencanaan mengenai topik-topik yang akan disajikan kepada pembaca esok.
- 2). Hasil rapat editor pada pagi hari, kemudian disampaikan kepada para wartawan/ reporter.
- 3). Hasil liputan wartawan, dibahas di masing-masing desk, misalnya desk humaniora, politik, olahraga, ekonomi dan sebagainya.
4. Keputusan di rapat desk, kemudian dibawa ke rapat editor pada sore hari. Pada saat itulah kami membahas mengenai berita-berita yang layak muat, layak halaman 1 dan berita yang tak layak muat.

Dalam pertemuan ini, LITBANG KOMPAS juga ikut serta sehingga bisa melengkapi data yang disajikan wartawan.

- 5). Berita yang sudah ditulis wartawan, kemudian disampaikan kepada editor untuk diulas substansinya.
- 6). Dari editor, berita kemudian diserahkan kepada PENYELARAS BAHASA untuk mengetahui keakuratan bahasanya. Tulisan selain harus lengkap dari sisi isi, juga harus benar dari sisi bahasa.
- 7). Setelah lolos dari penyeleras bahasa, sekali lagi berita di cek oleh korektor untuk memastikan berita yang disajikan tidak ada kesalahan.

Dalam beberapa kasus, masih ditemukan pula berita yang salah sari segi isi maupun bahasa. Untuk kasus seperti itu, semua pihak yang terlibat, mulai dari

wartawan, editor hingga bahasa, bisa dikenai sanksi sesuai kadar kesalahannya.

2. Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? Bagaimana sistemnya?

Dalam rapat redaksi, persoalan dibahas secara terbuka. Semua pihak bisa memberikan masukan terhadap suatu informasi atau persoalan.

RAPAT PAGI : Membahas persoalan-persoalan / peristiwa yang terjadi hingga malam hari/ dini hari. Dibahas pula berita-berita yang dimuat media lain sebagai perbandingan. Selain itu dibahas rencana liputan harian untuk semua desk, yaitu desk ekonomi, humaniora (pendidikan/kebudayaan, lingkungan, kesehatan dan teknologi), desk olahraga, desk luar negeri, desk metropolitan, desk politik dan hukum, desk non berita (kompas minggu), desk investigasi, desk sosok, desk nusantara, desk foto serta desk opini.

3. Bagaimana kebijakan redaksional dalam penyeleksian dan penentuan rubrik sebuah berita? Misal : apa perbedaan kategori rubrik Pendidikan & Kebudayaan dengan rubrik Politik & Hukum?

Meski ada desk, namun wartawan tidak terikat kaku pada masing-masing desk. Misalnya, jika ada wartawan desk ekonomi lalu menemukan peristiwa kebakaran, kecelakaan dan sebagainya, maka tetap harus meliput dan hasil liputannya diberikan untuk desk metropolitan. Jika ada wartawan desk ekonomi, ternyata muatannya lebih bersifat lingkungan, maka diberikan kepada desk humaniora yang menangani lingkungan. Setiap editor ketika menerima berita dari reporter di lapangan, akan memilah mana berita yang untuk desk sendiri, desk lain atau ditawarkan ke halaman satu. Semua dibicarakan secara terbuka dalam rapat desk.

Dalam rapat desk juga ditawarkan berita-berita yang layak untuk halaman 1. Jika ada sembilan desk, maka setidaknya ada 9 berita yang ditawarkan untuk halaman satu. Berita-berita unggulan tersebut kemudian dimusyawarkan setiap sore, mana yang lolos ke halaman satu dan berita mana yang layak menjadi headline.

Semua dilakukan secara transparan dan harus berdasarkan kesepakatan. Pimpinan tidak bisa melakukan intervensi di luar kesepakatan bersama.

4. Dalam berita-berita mengenai klaim Tari Pendet saya perhatikan sebagian besar berita masuk dalam desk Pendidikan&Kebudayaan atau Politik&Hukum. Setelah saya mengajukan permohonan wawancara mengenai topik ini kepada SKH Kompas, saya dimasukkan kedalam desk Humaniora. Mengapa bisa seperti ini pak? Apakah ada alasan khusus?

Dimasukkan ke desk humaniora, karena desk tersebut yang mengulas masalah pendidikan dan kebudayaan. Persoalan tari pendet belum dibawa ke ranah

hukum atau politik. Karena itu pembahasannya lebih dari sisi kebudayaan antarbangsa.

5. Apa yang menjadi pakem dalam pemberitaan SKH Kompas?

Berita yang layak muat di harian Kompas, pada dasarnya sama dengan media lain yakni harus mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik seperti prominence, proximity, magnitude, dsb. Meski demikian Kompas memberikan syarat tambahan seperti, tidak mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), tidak provokatif, tidak menyerang pribadi dan semua permasalahan disampaikan secara santun dan berimbang.

6. Kriteria apa yang dipakai oleh SKH Kompas dalam menentukan berita mengenai klaim Tari Pendet itu layak terbit?

Klaim tari pendet layak terbit karena menyangkut kekayaan budaya bangsa, dan kepedulian terhadap budaya bangsa sendiri. Liputan ini pun dimaksudkan antara lain agar masyarakat lebih peduli pada kekayaan budaya bangsa.

HASIL WAWANCARA

Kepala Desk Humaniora, Try Harijono

Tanggal : 21 Maret 2011

Tempat : Kantor Redaksi SKH Kompas lantai 5

1. *Bagaimana kisahnya sampai Anda bisa bergabung di SKH Kompas dan kini menjabat sebagai KaDesk Humanniora?*

Saya bergabung dengan Harian Kompas mulai Januari 1990. Untuk menjadi kepala desk humaniora sesuai ketentuan di Kompas harus melalui beberapa jenjang pendidikan, pelatihan dan penempatan tugas. Saya sempat ditugaskan di :

- Bandung (1990-1991)
- Yogyakarta (1991) Pendidikan di LP3Y
- Bandung (1991-1996)
- Cirebon (1996-2001)
- Jakarta (2002-2003)
- Balikpapan (2003-2005)
- Surabaya (2005-2006)
- Jakarta (2006-sampai sekarang)

2. *Sebagai kepala desk humaniora, apa saja yang menjadi job desk anda?*

Kepala desk humaniora menangani bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala desk humaniora dibantu dua wakil kepala desk.

3. *Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH Kompas?*

Kerja dan sinergi kerja yang berlangsung di harian Kompas berjalan baik, karena antar bagian harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Desk tidak mungkin berjalan sendiri, tetapi

menjalinkan kerjasama dengan desk lainnya. Misalnya untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah, desk humaniora bekerja sama dengan desk nusantara yang mengkoordinir teman-teman wartawan di daerah. Hal serupa kami jalin dengan desk lainnya seperti politik dan hukum, desk ekonomi maupun desk investigasi. Kerjasama antar desk ini untuk melengkapi bahan tulisan, sehingga berita atau tulisan yang disajikan kepada pembaca bisa lengkap, komprehensif dan akurat.

4. Apakah ada ideologi SKH Kompas yang ditanamkan/diterapkan dalam benak anda sebagai salah satu pekerjanya? Ideologi seperti apa? Apakah anda setuju dengan ideologi tersebut?

Ideologi yang ditanamkan kepada setiap wartawan dan karyawan Kompas adalah kemanusiaan berlandaskan Ketuhanan dan kejujuran. Artinya, tidak ada sekat-sekat berdasarkan golongan, agama, ras, maupun etnis dalam menjalankan pekerjaan. Semuanya mengabdikan dan berbuat seoptimal mungkin untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kompas menanamkan kejujuran sebagai hal yang paling utama. Tidak ada kompromi dan diskusi lagi soal kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat mutlak dan harus dijunjung tinggi, baik dalam tutur kata, perbuatan, dan termasuk soal keuangan.

5. Apa saran dan kritik anda secara umum yang dapat anda berikan untuk SKH Kompas, khususnya dalam menghadapi peristiwa konflik?

Kompas senantiasa berupaya untuk meredam dan mendinginkan konflik. Karena berita-berita yang disajikan tidak boleh provokatif, tendensius, dan memihak salah satu golongan. Berita yang disajikan haruslah mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan negara, termasuk tidak menimbulkan konflik.

6. Menurut anda, apa hambatan dan tantangan bagi SKH Kompas sebagai media nasional yang mempunyai nama besar dan terkenal dengan jurnalisme kepingnya?

Jurnalisme haruslah dibangun dengan kejujuran, objektif dan tidak memihak. Meski demikian, dalam sejumlah kasus terutama yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), penyajiannya haruslah hati-hati dan sangat bijaksana. Berita berbau SARA masih sangat sensitif di masyarakat kita, sehingga dalam kasus-kasus yang berbagai SARA penyajian berita harus mempertimbangkan banyak aspek sehingga media tidak menimbulkan gejala dan konflik di masyarakat. Media haruslah mendewasakan masyarakat.

7. Seperti apa alur proses produksi berita di SKH Kompas mulai dari pra hingga pasca produksi?

Proses produksi berita di SKH Kompas dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena itu berita-berita yang akan disajikan harus melalui rapat editor. Alur produksinya, setiap pagi para editor desk melakukan rapat perencanaan mengenai topik-topik yang akan disajikan kepada pembaca esok.

Hasil rapat editor pada pagi hari, kemudian disampaikan kepada para wartawan/reporter.

Hasil liputan wartawan, dibahas di masing-masing desk. Keputusan di rapat desk, kemudian dibawa ke rapat editor pada sore hari. Pada saat itulah kami membahas mengenai berita-berita yang layak muat, layak halaman 1 dan berita yang tak layak muat. Dalam pertemuan ini LITBANG KOMPAS juga ikut serta sehingga bisa melengkapi data yang disajikan wartawan.

Berita yang sudah ditulis wartawan kemudian disampaikan kepada editor untuk diulas substansinya. Dari editor, berita kemudian diserahkan kepada penyelaras bahasa untuk mengetahui keakuratan bahasanya. Tulisan selain harus lengkap dari sisi isi, juga harus benar dari sisi bahasa. Setelah lolos dari penyelaras bahasa, sekali lagi berita dicek oleh korektor untuk memastikan berita yang disajikan tidak ada kesalahan.

Dalam beberapa kasus masih ditemukan pula berita yang salah dari segi isi maupun bahasa. Untuk kasus seperti itu, semua pihak yang terlibat, mulai dari wartawan, editor hingga bahasa, bisa dikenai sanksi sesuai kadar kesalahannya.

8. *Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? Bagaimana sistemnya?*

Dalam rapat redaksi, persoalan dibahas secara terbuka. Semua pihak bisa memberikan masukan terhadap suatu informasi atau persoalan.

9. *Apa yang melatarbelakangi SKH Kompas mengangkat kasus klaim tari Pendet ini sebagai sebuah isu yang penting? Jika dibandingkan dengan media lain, hanya sedikit yg mengangkat kasus ini sedangkan Kompas berkali-kali..*

Saya kira ini persoalan serius yang sudah berulang kali dilakukan oleh Malaysia bahwa kekayaan budaya kita diklaim sebagai milik mereka. Memang tidak bisa..... disalahkan sepenuhnya, masyarakat kita sendiri memang kurang perhatian terhadap kekayaan budaya bangsa sendiri. Begitu misalnya sudah diklaim oleh negara lain baru kita dan masyarakat ribut sendiri merasa itu punya kita, tapi pemeliharannya tidak pernah dilakukan. Misalnya pelatihan tari pendet untuk anak-anak tidak pernah dilakukan, pementasan tari pendet secara periodik juga tidak dilakukan, paling-paling hanya di Bali saja disini tidak pernah dilakukan. Nah ini menggugah kesadaran kita semua bahwa sebenarnya bangsa ini kaya dengan tradisi budaya, ayo kita jaga bersama-sama, dari Kompas seperti itu.

Kita sibuk misalnya mencoba ke UNESCO melakukan mendaftarkan tentang angklung, batik, keris, supaya batik, keris, angklung diakui sebagai kekayaan warisan budaya tak benda dari Indonesia. Tapi Indonesia hanya cukup puas dengan pengakuan dari Unesco tersebut. Setelah angklung, batik, keris diakui sebagai kekayaan warisan budaya tak benda dari Indonesia, tidak ada kelanjutannya. Misalnya tidak pernah museum-museum melakukan pameran secara periodik, misalnya bulan Januari ada pameran keris di Bali, di Jogja misalnya ada Museum Negeri Yogyakarta memamerkan kekayaan keris Yogyakarta, museum nasional

seharusnya juga seperti itu. Mungkin karena keterbatasan biaya sehingga museum hanya memajang barang-barang kuno, tidak ada inovasi dan kreatifitas sama sekali. Bagaimana cara menarik masyarakat untuk mengunjungi museum? Kalau di luar negeri museum memamerkan koleksinya di mall, di pusat perbelanjaan..nah kemudian kalau ingin mengetahui lebih jauh datanglah ke museum. Soal kekayaan budaya seperti ini, tari pendet seharusnya juga ada penampilan secara periodik, apakah di istana, di televisi, atau kepada turis asing. Nah sekarang ini tidak ada kelanjutannya, turis asing kalau mau melihat tari pendet bagaimana dan dimana ini sangat susah.

10. Menurut SKH Kompas siapa yang mempunyai andil dan kepentingan dalam kasus ini?

Semua itu punya peranan, tapi pemerintah yang berada di depan. Mestinya pemerintah mengkoordinasikan. Ada asosiasi hotel, ada asosiasi travel agent, nah sebenarnya itu semua bisa bekerja sama dengan SMK yang mementaskan tari pendet. Kerjasama, duduk bareng, misalnya pengusaha restoran, hotel, pemerintah daerah, SMK atau ISI yang bidang kesenian, kerjasama yuk kita pentaskan tari pendet setiap bulan purnama. Nah, PHRI tentu menggandeng agent perjalanan turis, dikoordinasikan kemudian dikenai tambahan tarif. Tapi yang memimpin dalam rapat itu adalah pemerintah, hotel juga diuntungkan biaya menginap bertambah, resoran juga mendapat pendapatan, SMK ato ISI juga mendapat honor dari pementasan tari ini. Kerjasama ini yang harus dikoordinir oleh pemerintah atau badan kesenian daerah. SMK tidak bisa melakukan sendiri tanpa kerjasama dari hotel, travel agent. Hotel tidak bisa melaksanakan sendiri, paling tidak itu yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Mengkoordinasikan semuanya.

11. Tadi bapak bilang pemerintah itu punya peranan besar karena berada di depan. Tapi kalo dari saya baca berita Kompas seolah-olah ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah itu juga punya kesalahan dalam kasus ini. Kalau menurut bapak bagaimana?

Saya juga tidak pernah dapat mengidentifikasi jenis kesenian daerah sejak Indonesia merdeka kemudian berkali-kali mengalami pergantian pemerintah, tidak pernah kita punya data jenis kesenian daerah. Ada yang pernah ada dan hidup misalnya kesenian di Jawa Barat mana yang masih aktif eksis, mana yang sudah punah, mana yang sudah kritis karena tidak ada penerusnya, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Kalau misalnya ada, tidak pernah disosialisasikan, di internet sangat susah dapat informasi jenis kesenian di tiap daerah. Padahal kita ada Dinas Pariwisata dan Budaya di masing-masing daerah tapi tidak pernah melakukan pencatatan secara detail. Karena saya lama di Jawa Barat, misalnya ada kesenian Lais yg dia beratraksi dari bambu ke bambu, berloncatan, bisa tiduran di bambu. Nah kesenian itu ada dimana, siapa pemainnya itu harusnya ada misalnya. Jadi tidak perlu kalau misalnya ada ulang tahun tidak perlu pakai dangdutan atau kesenian aneh-aneh, tapi coba angkat kesenian daerah. Misalnya Jogja ultah angkat kesenian daerah. Ini kan tidak. Anak muda tidak tahu kesenian daerah ini ada. Seniman daerah juga kesulitan untuk berkembang karena tidak pernah ditanggap diajak untuk pentas. Kesalahan dimana, ya pemerintah tidak bisa mengkoordinasikannya, ada dinas pariwisata dan budaya tapi hanya sekedar bagaimana menarik wisatawan asing datang ke sini tanpa berupaya bagaimana melestarikan kesenian yang ada. Di berbagai negara bisa dilihat, misalnya negara yang baru berkembang bukan maju. Filipina misalnya hanya menyusuri sungai di atas kapal, didorong menyusuri sungai sambil disugahi makanan khas pariwisata. Di situ dipentaskan musik-musik kesenian daerah. Diberbagai titik kapal ini singgah juga dipentaskan kesenian daerah. Kemudian beberapa titik berhenti lagi dan disugahi kesenian daerah, begitu kembali dikasih cinderamata yang khas. Semua hidup. Wisatawan senang karena bisa mengenal alam Filipina, seniman senang ada yang nonton dan ada yang kasih uang. Restoran senang ada yang makan, dapat uang. Di Indonesia tidak seperi ini. Sungai sangat banyak, air dibiarkan mengalir ke laut tanpa dibuat pariwisata. Coba di Kalimantan yang banyak sungainya, tapi tidak pernah

dipentaskan seperti itu. Indonesia ini sangat kaya akan kesenian tapi tidak dimanfaatkan secara optimal, sayang sekali.

12. Berarti pemerintah Indonesia sikapnya juga sama seperti masyarakat Indonesia ya Pak?

Pemerintah hanya menunjukkan keberhasilan-keberhasilan saja bahwa berhasil mendatangkan 7 juta wisatawan, naik dari 6 juta. Tanpa pernah kita tahu bagaimana cara mencatat 7 juta wisatawan itu. Kalau 7 juta wisatawan dibagi 12 bulan berarti hampir 600.000 orang datang tiap bulan ke Indonesia. Itu sama dengan kapasitas 5 kali stadion Senayan, pasti banyak sekali. Tapi mana wisatawannya, kita kok jarang melihat banyak wisatawan datang kesini? Bagaimana cara menghitungnya sampai 7 juta? Dari mana saja mereka? Sibuk dengan klaim keberhasilan tanpa pernah kita menghitung berapa mereka membelanjakan uangnya di Indonesia. Mestinya itu dihitung, baru kita patut berbangga dan siapa yang paling diuntungkan dengan kedatangan wisatawan-wisatawan ini. Kami khawatir jangan-jangan ada pencatatan ganda, begitu datang ke bandara dicatat, di hotel dicatat, ke tempat wisata dicatat kembali, kemudian diakumulasi sehingga angkanya mencapai 7 juta. Itu angka-angka yang tidak sebenarnya, kami khawatir itu seperti itu. Tapi yang penting adalah pemerintah tidak mudah mengklaim mendatangkan wisatawan, tapi yang penting adalah bagaimana wisatawan ini memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dapat menghidupi kesenian-kesenian tradisional yang ada di Indonesia.

13. Itu yang Bapak bilang ada klaim wisatawan 7 juta itu dari mana Pak?

Itu klaim dari...eemm..setiap tahun Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selalu mengklaim jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, tapi kita tidak tahu bagaimana metodologi penghitungannya, jumlah 7 juta itu kan jumlah yang besar sekali.

14. Menurut SKH Kompas, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan budaya dan konflik dengan Malaysia?

Saya kira tidak cuma sebatas klaim saja tapi bagaimana cara mengembangkan tari pendet ini, misalnya sepakbola dari Inggris apakah cukup Inggris mengklaim bahwa sepakbola olahraga dari Inggris saja. Tidak seperti itu tapi bagaimana supaya kesenian ini menyebar kemana-mana sehingga disukai oleh dunia dan orang tau bahwa sepak bola ini berasal dari Inggris. Barongsai misalnya itu dari China, apakah tidak boleh ditampilkan di Indonesia? Boleh saja, tetapi orang tahu bahwa Barongsai itu dari China. Wushu misalnya atau Tekwondo, Kungfu. Apakah hanya sebatas di China? Boleh di Indonesia tapi orang tahu bahwa itu sumbernya dari China, berasal dari China. Karate dari Jepang, orang tau bahwa Karate itu bela diri dari Jepang yang menyebar ke seluruh dunia dan olah raga yang bagus. Pendet, tidak sebatas itu klaim milik Indonesia, tapi tantangannya adalah bagaimana pengembangan tari Pendet bisa menyebar ke seluruh dunia dan orang tau bahwa ini adalah kesenian asli Indonesia. Jangan sampai ini menyebar ke seluruh dunia, seperti gamelan itu dipelajari di sekolah-sekolah di Jerman, tapi di Indonesia sendiri tidak ada eskul soal gamelan, itu kan sangat memprihatinkan. Boleh saja orang-orang Eropa belajar tentang Gamelan biar mengetahui inilah kesenian dari Indonesia, tapi di Indonesia sendiri tidak ada. Di Indonesia itu kita bangga kalau eskul bisa belajar tentang drumband tapi tidak bangga kalo belajar angklung dan gamelan. Di gamelan diajarkan untuk gotong royong, toleransi, tepa seliro. Tidak bisa ingin pentas sendiri kemudian main sekeras-kerasnya, sesering mungkin, sangat keras dan musik lainnya tidak diberi tempat, itu tidak bisa. Artinya toleransi, tepa seliro dengan musik lain sehingga bisa menghasilkan irama yang bagus. Itulah sebenarnya tradisi Indonesia, gotong royong hidup rukun bisa tepa seliro. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana mengembangkan misalnya liberalisme, orang ingin vokal sendiri, bangga sendiri menjadi vokalis kemudian anggota band-band lainnya itu tidak diberi tempat, hanya sebagai

pengiring. Nah tradisi Indonesia misalnya angklung, mau bunyi sendiri itu tidak bisa, harus dimainkan bersama. Angklung itu mencerminkan Indonesia, harus bergotong rotong dan toleransi, dimainkan bersama-sama dan masing-masing harus tahu peran dan tugasnya kapan harus membunyikannya. Kapan harus bunyi do, kapan re, semua harus tahu diri dan aturan, harus ada kesepakatan yang dijalankan bersama. Nah ini yang tampaknya Indonesia hanya sebatas mengklaim saja belum mengembangkan. Apakah ada sekolah yang mengembangkan angklung sebagai eskul di sekolah? Sangat jarang! Cuma sebatas bangga saja bahwa angklung kesenian Indonesia. Tapi BudPar sendiri tidak berupaya misalnya membeli sekian ratus angklung kemudian disebar ke seluruh sekolah di Indonesia sehingga ada eskul angklung. Kemudian ada lomba angklung ditiap sekolah dan tingkat nasional, tapi tidak ada. Sama misalnya batik, kita bangga, kita ribut ketika Malaysia juga mempunyai batik kemudian mengklaim bahwa batik milik Indonesia. Cuma sebatas itu saja. Tidak ada eskul batik. Pembatik dari Jogja, Solo, Cirebon, Pekalongan itu datang ke sekolah-sekolah memberikan kursus batik selama 3,4,5 bulan. Pembatik senang karena dapat penghasilan tambahan, dia senang karena ketrampilannya dipakai oleh siswa, siswa juga senang karena punya pengetahuan dan ketrampilan membatik. Kesenian tradisi ini akhirnya bisa turun-temurun. Tapi seperti sekarang, hanya sebatas klaim bahwa batik milik Indonesia, mau seperti apa dalam 20-30 tahun kedepan, tidak akan berjalan.

15. Kalau hubungan dengan Malaysia bagaimana? Karena tidak sekali dua kali Indonesia bermasalah dengan Malaysia?

Disatu sisi Malaysia ini juga besar kepala, karena dulu negara yang sangat disegani, Indonesia, Indonesia pernah menjadi negara yang sangat kuat dimasa presiden Sukarno. Angkatan perangnya sangat kuat, itu jauh dengan negara-negara lain. Sehingga disegani oleh negara lainnya, Malaysia, Thailand, Singapura, itu sangat takut dengan Indonesia. Karena saat itu kita punya rasa kebangsaan, rasa nasionalisme yang kuat diantara para pemimpin.

Karena para pemimpin juga memberi contoh hidup sederhana dan menumbuhkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat. Didukung dengan kebanggaan angkatan perang yang sangat kuat. Nah sekarang Indonesia dilecehkan oleh negara-negara sekitar termasuk Malaysia karena rasa nasionalisme-nya luntur dikalangan masyarakat. Dikalangan pemerintah juga tidak ada keteladanan bagaimana untuk mencintai negara ini. Nah sekarang ini kesenjangan sangat tinggi, persoalan sangat kompleks, dari dalam negri tidak ada keteladanan dari para pemimpin, rasa nasionalisme berkurang, rasa kebanggaan sebagai bangsa juga berkurang. Malaysia juga merasa besar kepala karena dia mempunyai sumber daya yang bagus. Dulu Malaysia belajar dari Pertamina bagaimana untuk mengolah minyak, kini mereka mereka mempunyai menara kembar Petronas sebagai salah satu ikon pariwisata mereka. Dulu guru-guru Indonesia diminta untuk mengajar di Malaysia, kini banyak orang Indonesia datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan.

16. Lalu dengan banyaknya orang Indonesia yang ada di Malaysia, apakah ini berpengaruh Pak?

Buyutnya itu dari Indonesia, tentu kesenian-keseniannya itu hampir ada kemiripan. Apalagi kalau melihat kesenian di Kalimantan Timur atau Barat yang berbatsan langsung dengan Malaysia. Hanya batas teritorial yang menbatasi, tapi persaudaraan mereka tetap kuat. Jadi sekali lagi, klaim-klaim itu perlu sih perlu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dan memelihara kesenian yang ada, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan klaim-klaim itu.

17. Mengapa SKH Kompas jarang memberitakan mengenai keadaan yang terjadi di Malaysia terkait kasus ini? Karena saya perhatikan SKH Kompas baru memberitakan dari pihak Malaysia dan mengambil narasumber Malaysia sejak adanya peristiwa

pemanggilan Dubes RI di Malaysia oleh Kementerian Malaysia. Apakah ada wartawan Kompas yang ditugaskan ke Malaysia?

Saya lupa, tapi kayaknya kita menganggap bahwa tidak perlu sampai ada wartawan yang kesana. Ketika ada peristiwa krusial yang dibutuhkan oleh pembaca, baru kita mengirim wartawan ke lokasi, seperti misalnya peristiwa di Mesir dan Lybia. Menurut saya dari Indonesia sudah cukup tidak perlu ke lapangan. Karena yang terpenting sebenarnya bagaimana upaya pemerintah itu melindungi bukan Malaysia-nya.

18. Kalau dalam berita itu peliputan harus ada dua sisi, nah kalau dalam artikel ini cuma beberapa saja yang mengambil narasumber dari Malaysia. Menurut bapak ini bagaimana?

Sumber itu tidak harus datang ke lokasi, tapi Kompas juga berlangganan beberapa kantor berita. Ada Reuters kita langganan, kemudian koran-koran luar negeri kita juga langganan setiap hari. Kemudian kita juga bisa melihat suara-suara Malaysia dari kantor berita Bernama Malaysia, kemudian koran-koran Malaysia. Kita ikutin perkembangannya. Yang heboh itu kan Indonesia, Malaysia sebenarnya tidak begitu heboh. Kembali lagi bahwa berita itu harus berimbang, tapi kita bisa dari narasumber itu dari kantor berita atau pihak yang berwenang di Malaysia. Nah dalam kasus ini yang kita sasar adalah kepedulian pemerintah bukan Malaysia, kepedulian bagaimana mengembangkan dan melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia.

19. Aspek netralitas dalam berita, sedangkan bapak bilang bahwa SKH Kompas ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu masih kurang usahanya. Bagaimana posisi bapak dan SKH Kompas untuk menunjukkan netralitas SKH Kompas tapi tetap bisa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah harus bergerak?

Netral itu tidak berada dalam ruang hampa, tidak berarti tidak berpihak pada apa-apa. Kita harus punya keberpihakan. Kita berpihak pada kebenaran, menyajikan berita yang berimbang. Kita berpihak pada rakyat kecil, tapi beritanya berimbang. Jadi netral bukan berarti berada pada ruang hampa apa adanya, kita tetap harus bersikap kritis pada pemerintah. Tidak bisa misalnya netral apa adanya kemudian disajikan tanpa ada sikap menggugat sama sekali. Misalnya Indonesia mengklaim, eh Malaysia mengklaim Pendet milik Malaysia. Indonesia mengklaim tari Pendet milik Indonesia, sudah seperti itu saja tanpa ruang apa-apa, tidak bisa seperti itu. Dalam berita juga harus digugat, apa yg sudah dilakukan pemerintah dalam melestarikan tari Pendet, upaya-upaya apa yang sedang dilakukan, apa kendala pemerintah, apa yang sedang dilakukan oleh seniman itu harus kita gugat, nah akhirnya berpulang pada pembaca, mana yang benar apakah Malaysia atau Indonesia? Kita menunjukkan bahwa pemerintah juga tidak peduli, bahwa seniman juga tidak mendapatkan tempat untuk menampilkan kesenian mereka. Itu kita sajikan, biarkan pembaca yang kita sebut netral itu yang menentukan apakah Malaysia atau Indonesia yang salah? Bisa-bisa duanya memang salah, Malaysia juga keterlaluannya karena besar kepala, Indonesia juga salah karena tidak melestarikan tari Pendet.

20. Nasionalisme dari wartawan yang juga orang Indonesia. Bagaimana penyaringannya agar berita yang dikeluarkan tidak berpihak walaupun kita tetap orang Indonesia?

Berpihak itu pasti ada, tetapi tidak provokatif dan emosional. Kematangan wartawan itu juga menentukan, wartawan yang muda mungkin emosional ketika melakukan peliputan, tetapi masih ada editor yang umumnya lebih senior, emosinya lebih mengendap, logika lebih berjalan, sehingga kalau ada berita-berita yang memancing emosional yang bisa memicu kekeruhan antara dua bangsa ini bisa diperhalus, sehingga berita yang keluar itu tetap mementingkan perdamaian, kalau ada perbedaan itu diselesaikan melalui dialog bukan kekerasan.

21. Apa maksud dari redaksi terhadap ungkapan bahwa Malaysia merupakan bangsa yang kekurangan identitas (Kompas 23-08-2009, Bung Karno Mendukung Pemassalannya... -paragraf 1)?

Mungkin Malaysia akan sangat banyak berpotongan dengan Indonesia. Perpotongan-perpotongan ini lebih besar irisannya berada di Indonesia. Kesenian-kesenian Melayu itu jauh lebih banyak ada di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Tapi lagi-lagi Indonesia tidak bisa menjaga kekayaan budayanya lagi-lagi. Nah Malaysia sekarang akan membangun museum sejarah Melayu, dia mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa catatan atau naskah kuno dari Melayu. Dia mencari ke Bangka, Aceh, Belitung, Padang, semua dibeli, dananya tanpa batas kemudian dibawa ke Malaysia untuk dijadikan koleksi museum kebudayaan Melayu. Sementara Indonesia yang mengklaim bahwa Indonesia punya kesenian Melayu itu tidak punya museum Melayu sampai saat ini. Ketika Indonesia mengklaim bahwa Melayu adalah asli Indonesia kita tidak punya bukti karena naskah-naskahnya sudah banyak yang dibeli oleh Malaysia. Kita hanya tinggal sedikit dan hingga saat ini pemerintah tidak pernah peduli untuk membeli dan menyelamatkan naskah-naskah Melayu. Jadi identitas mereka ada sedikit Melayu tapi mereka sangat cerdas. Naskah-naskah Indonesia dibeli tanpa batas anggaran dan dibawa ke Malaysia. Ketika Indonesia ingin mengklaim Melayu, kita sudah tidak punya bukti dan sampai saat ini kita masih tidak peduli.

22. Mengapa terdapat perbedaan dalam pemberitaan seputar kasus ini, diawal SKH Kompas menggunakan "Klaim Tari Pendet" sedangkan diakhir-akhir berita SKH Kompas lebih sering menggunakan "Penggunaan Tari Pendet"?

Kita di akhir-akhir lebih spesifik bahwa bahwa Malaysia itu sangat agresif dalam menjalin wisatawannya. Di Eropa, Malaysia promosi di pesawat bahwa Malaysia truly Asia. Indonesia tidak pernah melakukan promosi seperti itu, promosi Indonesia sangat sedikit. Indonesia hanya melakukan pameran-pameran kebudayaan saja atau pameran kesenian di dunia

terutama di Jerman. Nah termasuk juga yang dilakukan Malaysia adalah menyajikan tari Pendet untuk promosi pariwisata Malaysia, secara tidak langsung itu mengklaim bahwa tari Pendet milik Malaysia karena ada dalam angle iklan itu. Nah belakangan kita memang lebih spesifik lagi bahwa itu memang ada dalam iklannya yang ada di discovery dan segala macam. Duduk persoalannya adalah bukan secara tertulis tapi klaim di iklannya bahwa itu Malaysia yang secara tidak langsung bilang bahwa Pendet milik Malaysia, padahal kita tahu sendiri bahwa Pendet dari Indonesia.

23. Apa yang mendasari SKH Kompas mencantumkan ilustrasi daftar budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain pada artikel berjudul “Perlindungan Budaya Lemah (31/08/09)” ?

Kita ingin mengingatkan pembaca terutama pemerintah bahwa Indonesia begitu kaya akan kesenian, tapi kita tidak pernah menjaga. Ibaratnya dirumah itu banyak barang tapi kita sendiri tidak tahu barang apa saja milik kita. Kalau sudah diambil orang lain baru kita ribut, tapi kita tidak pernah menjaga barang kita. Begitu pula dengan kesenian-kesenian, banyak yang diklaim oleh negara lain tapi Indonesia tidak peduli. Itu tadi, kita lebih sibuk dengan promosi bahwa kita sudah bisa mendatangkan 7 juta wisatawan tapi pengidentifikasi, pemeliharaan jenis-jenis kesenian Indonesia itu tidak dilakukan, bahkan pemerintah nyaris tidak melakukan langkah apapun untuk menyelamatkan kesenian di Indonesia.

24. Pada artikel-artikel yang dikeluarkan, SKH Kompas sering menyebut Tari Pendet sebagai kesenian daerah, namun pada artikel lain disebutkan bahwa Tari Pendet merupakan produk budaya. Menurut anda bagaimana SKH Kompas memandang Tari Pendet ?

Agak khas kesenian di Bali karena menyatu dengan religi, makanya bisa hidup. Itu berbeda dengan kesenian di daerah-daerah lain katakanlah Jaipong di Jawa Barat itu tidak ada kaitan

dengan religi bahkan bisa dikatakan itu berbenturan. Nah di Bali uniknya adalah bersatu dengan religi, jadi tanpa peran pemerintah tari Pendet ini tetap bisa terpelihara namun hanya terbatas di lokal Bali. Bagaimana mengembangkannya itu yang tidak dilakukan pemerintah. Tarian Bali seharusnya tidak hanya bisa dipentaskan di Bali, diluar daerah seharusnya juga bisa. Sekarang ini sangat minim sanggar-sanggar tarian Bali yg menampilkan tarian-tarian khas Bali. Ini juga jadi persoalan tersendiri karena tidak ada stimulus dari pemerintah. Seperti contohnya lomba angklung dan gamelan.

25. Bagaimana pandangan SKH Kompas mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik?

Sejak semula Kompas itu tidak berambisi dan menghindari betul liputan dan penyajian berita yang provokatif, yang dapat memanaskan suasana. Tapi menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Itu yang paling penting dan kemudian menyerahkan semuanya pada pembaca, apalagi isu-isu seputar SARA itu betul-betul dihindari. Kalaupun betul-betul ada konflik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan adalah bagaimana upaya untuk mendamaikan bukan memanaskan-manasi namun menjelaskan duduk persoalan semestinya dan sedapat mungkin itu mendinginkan suasana.

26. Apakah ini masuk konflik budaya menurut Kompas?

Saya kira ini tidak termasuk konflik, tapi lebih kepada ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat kita dan semua pihak yang berkepentingan pada kesenian daerah sehingga diklaim oleh Malaysia, belum sampai pada taraf konflik.

27. Apakah dalam kasus ini jurnalisme damai itu juga dipakai?

Ya bisa seperti itu juga, jadi tidak mengompromi masyarakat. Karena khawatir juga kalo emosional yang ditonjolkan yang terjadi malah nanti masyarakat menyerbu kedutaan besar

Malaysia kemudian menginjak-injak rasa kebangsaan Malaysia, bukan itu yang diharapkan. Kita menghindari betul apapun perbedaannya, kita selesaikan dengan bijak, betul-betul tidak boleh ada konflik dan kekerasan sama sekali. Kita juga melihat jangan sampai berita-berita yang disajikan itu memancing emosi dan kemarahan masyarakat untuk menyerbu kedutaan besar Malaysia. Tidak itu yang kita inginkan, tapi kepedulian yuk bangun semua, kita ini ada kekayaan bangsa yang diklaim oleh pihak lain. Yuk kita jaga kekayaan bangsa ini dengan cara yang santun.

28. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai?

Jurnalisme damai itu sudah jadi harga mati yang dilakukan oleh semua wartawan Kompas. Ketika menjadi wartawan Kompas, ada pendidikan di kelas 6 bulan kemudian pendidikan di lapangan 6 bulan. Nah, setelah itu juga melakukan tahapan-tahapan. Begitu pula dengan berita yang dibuat itu dari reporter, kemudian ke editor, penyelaras bahasa, korektor, kemudian ke redaktur pelaksana. Sehingga jurnalisme damai itu sudah menyatu dengan wartawan Kompas. Berita-berita yang provokatif tentu tidak akan dimuat oleh wartawan Kompas. Kalau ada wartawan yang lengah, maka akan disaring lagi oleh editor. Editor lengah, maka ada penyelaras bahasa, setelah penyelaras bahasa masih ada korektor. Jadi bertahap sehingga jurnalisme damai itu menjadi roh, menjadi jiwa dari semua wartawan Kompas.

29. Pendiri SKH Kompas, Bapak Jakob Oetama pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang komunikasi karena menawarkan jurnalisme damai dalam pers Indonesia. Apakah peristiwa ini juga mempengaruhi SKH Kompas dalam menggunakan jurnalisme damai dalam pemberitaannya?

Dia dapat dari UGM ya. Itu dari para pendiri Kompas dulu itu sudah ditekankan betul bahwa koran kita adalah koran umum sehingga tidak mementingkan satu golongan. Walaupun pendiri dari Jogja tapi tidak hanya berita dari Jogja saja yang dimuat, tapi juga dari kota-kota yang lainnya juga dapat porsi yang sama. Tidak berdasarkan daerah, tapi substansi beritanya, penting dan layaklah untuk dimuat. Kita setiap pagi itu ada rapat, beliau juga terkadang hadir dan senantiasa menekankan bahwa berita yang ditulis Kompas itu tidak provokatif, semua disajikan dengan cara santun dan sopan walaupun kita marah misalnya ada kekurangan pangan atau kenaikan BBM. Itu semua disajikan secara santun, karena pilihan kata itu juga menunjukkan siapa orang yang membuat. Kata yang kasar bisa dikatakan bahwa orang yang membuat itu juga kasar. Tapi ketika substansi penting disampaikan dengan kata-kata halus itu akan lebih mengena. Para senior selalu menekankan ketika kita ingin mengingatkan kesalahan orang maka caranya adalah ditepuk pundaknya dan diberi tahu yang benar itu seperti apa. Daripada dipukul maka orang tidak akan simpati.

30. SKH Kompas itu terkenal dengan jurnalisme keping, bagaimana menurut Bapak?

Kadang-kadang kita harus melihat emosi masyarakat pembaca secara luas. Taruhlah kalo misalnya kita kritik pemerintah tapi juga dekat dengan pemerintah. Hubungan Kompas dengan narasumber itu juga seperti pacar, kadang akur kadang tidak. Namun yang terpenting adalah kita selalu kritis. Tidak semua bagian pemerintah itu mau dikritik, sehingga ketika misalnya ada yang emosional dengan kritikan kita maka kita perhalus. Presiden misalnya kita kritik karena kurang tegas dengan kasus Century, korupsi lalu marah, maka kita redakan dengan menaruh fotonya di halaman 1.

31. Bentuk marahnya pemerintah seperti apa Pak?

Kita punya sumber-sumber di istana, itu kita selalu mendengar bagaimana situasi psikologis bagaimana pemegang kekuasaan terhadap pemberitaan di Kompas. Tapi kita juga tidak

menjelek-jelekan pemerintah, dalam hal yang bagus tentu kita kasih panggung juga. Tapi kita juga melakukan kritik gugatan juga apakah benar, karena fungsi pers itu seperti itu.

32. Ada pemberitaan mengenai Bentara Budaya di Bali, apakah ini ada maksud lain?

Itu kebetulan saja. Kompas itu sangat peduli dengan persoalan-persoalan kebudayaan. Kompas membangun bentara budaya di Jakarta, Jogja dan Bali. Itu non profit, bahkan iklan pun tidak boleh. Ini semata-mata hanya memberikan tempat atau panggung. Ini upaya Kompas untuk mengembangkan budaya. Nah bertepatan dengan itu Kompas meresmikan bentara budaya Bali, tidak ada kaitannya, hanya kebetulan momentumnya pas.

33. Bukan ingin menunjukkan bahwa ini lho Kompas peduli dengan budaya?

Tidak, kita tidak tinggi hati. Kita langsung melakukan langkah nyata bahwa langkah konkrit yang kita lakukan adalah dengan membangun bentara budaya di beberapa tempat.

SEJARAH, ORGANISASI DAN VISI-MISI KOMPAS

Tujuan instruksional	: pemahaman sejarah, organisasi dan visi – misi Kompas
Sarana pelajaran	: makalah, film company profile
Waktu	: 90 menit.

Sejarah / Latar Belakang

1. Lahirnya Intisari

Pada tahun 1960-an Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama sering bertemu dalam gerakan asimilasi. Kedua-duanya punya latar belakang guru, dan punya minat dalam bidang sejarah. PK. Ojong adalah Pemimpin Redaksi *Star Weekly*, sedangkan Jakob Oetama Pemimpin Redaksi majalah *Penabur*. Mereka berbincang-bincang, bahwa pada waktu itu pembaca Indonesia terkucil karena tidak ada majalah luar negeri yang diperkenankan masuk. Keadaan seperti itu tentunya tidak sehat. Muncul ide membuat majalah untuk menerobos isolasi itu.

Intisari adalah awal dari kerjasama PK. Ojong dengan Jakob Oetama. Disebut Sang Pemula karena memang kemudian menjadi awal (pemula) dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang awalnya berkembang dari multiple media sebagai *core business*, tetapi kemudian berkembang menjadi *multibusiness group of companies* yang terdiri atas *related diversification* dan *unrelated diversification*.

Untuk memperoleh ijin terbit bagi majalah Intisari. PK. Ojong dan Jakob Oetama pergi ke gedung Kodam (Komando Daerah Militer) di jalan Perwira, Jakarta. Jakob Oetama masih ingat, ia masuk *serdadikan*, sementara PK. Ojong menunggu dalam mobil Opel Caravan-nya yang diparkir jauh-jauh. Jakob mendapat kesan mantan Pemimpin Redaksi *Star Weekly* yang lebih tua 12 tahun itu orang yang cermat dan tidak setengah-setengah. "semua disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti".

Majalah Intisari terbit 7 Agustus 1963 dengan 22 artikel, tiras pertama 10.000 eksemplar habis terjual, hitam putih dan telanjang, tidak dibalut kulit muka. Ukurannya kecil, 14 X 17,5 cm dan tebalnya 128 halaman. Drs. Jakob Oetama menjadi pemimpin redaksinya. Nama PK. Ojong dan Adi Subrata tidak tercantum sebagai pengasuh. Mereka menulis seakan-akan penulis luar. Penulis-penulis luar diantaranya Nugroho Notosusanto ("orang Jakarta di London"); Soe Hok Djin ("Beberapa hari di Ubud"); Soe Hok Gie ("Pengalaman lucu pelukis Nashar"); Kapten dr. Ben Mboi menceritakan pengalamannya diterjunkan dan hidup bergerilya di belantara Irian Barat dalam rangka Trikora, Tan Liang Tie wartawan olah raga sejak *Star Weekly* menulis Zatopek atlet pelari dari Cekoslowakia yang disertai melatih atlet Indonesia menghadapi Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*). Nama-nama lain, diantaranya: Muhamad Ali, Siswadhi, Ajip Rosidi dan Rijono Pratiko.

2. Kondisi Politik Sekitar Tahun 1965

Suhu politik di Indonesia memanas menjelang tahun 1965 ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kegiatan sepihak, bahkan menyuarakan perlunya dibentuk angkatan kelima untuk menghadapi alat-alat keamanan negara yang sah, ABRI. Dengan dalih *landreform* PKI melakukan penyerobotan tanah milik negara. Aksi serupa ini dilukiskan oleh "Harian Rakyat" sebagai adil dan patriotik.

Suatu hari awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani (1922-1965) selaku Menteri/Panglima TNI-AD menelpon rekannya sekabinet, Drs. Frans Seda. Yani melemparkan ide menerbitkan koran melawan pers komunis. Frans Seda menanggapi ide itu, membicarakan dengan Ignatius Josef Kasimo (1900-1986) – sesama rekan di Partai Katolik – dan dengan rekannya yang memimpin majalah Intisari, Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama.

PK, Ojong dan Jakob Oetama kemudian menggarap ide tersebut dan mempersiapkan penerbitan koran. Semula nama yang dipilih "Bentara Rakyat", penggunaan nama itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya bukanlah PKI. Dalam keperluan dinas Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan (1964-1966) menghadap presiden di Istana Merdeka, Soekarno telah mendengar bahwa Seda akan menerbitkan sebuah koran lalu menyarankan nama "Kompas", *pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba*. Maka jadilah nama harian Kompas hingga saat ini, sementara nama Yayasan Bentara Rakyat sebagai penerbit harian Kompas. Para pendiri Yayasan Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katolik seperti : Partai Katolik, Wanita Katolik, PMKRI, dan PK, Ojong. Pengurus yayasan terdiri dari Ketua : I.J. Kasimo, Wakil Ketua: Drs. Frans Seda, Penulis I : F.C. Palaunsuka, Penulis II : Jakob Oetama, dan Bendahara :PK, Ojong.

Walaupun restu dari Presiden Soekarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses ijin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kakitangannya "menguasai" aparatur, khususnya Departemen Penerangan Pusat dan daerah. PKI tidak mentolerir sebuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi ijin prinsip namun harus dikonfirmasi ke Daerah Militer V Jaya. Persyaratan terakhir untuk dapat terbit, harus ada bukti 3.000 (tiga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perijinan Puskodam V Jaya menyerah dan mengeluarkan ijin terbit. Pers PKI yang melihat kehadiran "Kompas" bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan mengartikan "Kompas" sebagai "Komando Pastor".

3. Kompas Lahir 28 Juni 1965

Minggu, 27 Juni 1965, sekitar tengah malam jalan Kramat Raya sudah sepi. Pertunjukan terakhir bioskop Rivoli juga telah berakhir, dan penonton beberapa jam lalu berhamburan pulang. Tinggal beberapa becak yang masih mangkal di malam yang dingin itu. Tidak jauh dari situ kegiatan percetakan PN Eka Grafika (dahulu Percetakan Abadi) baru mulai, beberapa orang berkumpul mengelilingi mesin cetak Duplex. PK, Ojong (alm), Jakob Oetama serta beberapa wartawan Theodoros Purba (alm), Tinon Prabawa (alm), Tan Soe Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Edward Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, dan Harthanto (alm). Mereka nampak tidak sabar dan was-was, diantara mereka sebentar-sebentar melihat arlojinya mirip sebuah penantian lahirnya bayi pertama. Wartawatnya, Erka Muchsin (alm) dan Threes Susilastuti (alm) menanti penuh harap di rumah.

Di sudut lain, duduk di kursi menghadap meja korektor adalah Kang Hok Djin, Kang Tiauw Liang, Dj.Pamoeedji, Dimiyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Ketika koran pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan menyambutnya. Diiringi kilatan lampu kilat dari kamera Sudardja (wartawan foto majalah Penabur),

suasana seketika menjadi berubah. *Harian Kompas* lahir tanggal 28 Juni 1965 dengan motto "**Amanat Hati Nurani Rakyat**" itu, keesokan harinya mulai dipasarkan. *Kompas* pertama terbit empat halaman. *Kompas* edisi pertama memasang sebelas berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri di halaman pertama. Berita utama di halaman satu ketika itu berjudul "KAA Ditunda Empat Bulan". Pojok *Kompas* di kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "*Mari ikat hati. Mulai hari ini, Dengan ... Mang Usil*". Di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama : Pemimpin Redaksi Drs. Jakob Oetama, Staf Redaksi : Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, Eduard Liem.

Sementara istilah Tajuk Rencana ketika itu belum ada, namun halaman II ada lahirnya *Kompas*, tajuk surat kabar ini. Di halaman II pula terdapat antara lain berita luar negeri dan dua berita dalam negeri. Ditambah tiga artikel, satu diantaranya menyangkut luar negeri. Di halaman ini ada kolom hiburan *Senyum Simpul*. Halaman III ketika itu antara lain berisi tiga artikel, satu diantaranya mengenai luar negeri. Ada pula alasan mengenai penyakit ayun dari Dr. *Kompas*. Sedangkan dalam IV antara lain berita dan artikel luar negeri dua dan satu dalam negeri. Di halaman ini hanya tercatat dua berita olahraga, satu diantaranya mengenai "Persiapan Team PSSI ke Pyongyang". Waktu itu iklan masih kurang dari separuh halaman. Dari enam iklan, satu diantaranya dari redaksi *Kompas* tentang "Permintaan menjadi langganan *Kompas*". Iklan paling besar dan bergambar hanya satu, yaitu obat batuk dan caeigan.

Kedua perintis *Kompas* setiap saat terjun langsung ke bawah. Mereka berusaha agar dari hari ke hari mutu *Kompas* kian baik. Karena itu, setelah sebulan di cetak di Eka Grafika, harian ini kemudian dicetak di Percetakan Masa Merdeka Jl. Sangaji, Jakarta. Percetakan ini memang lebih baik. Meskipun sistem setengahnya masih cetak timbul, namun percetakannya sendiri sudah menggunakan mesin rotasi. Karena itu, daya cetaknya lebih cepat. Dan memang semenjak itulah oplag *Kompas* naik dari semula 4.800 eksemplar di masa Eka Grafika, melonjak menjadi 8.003 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1967 oplag *Kompas* 30.650 eksemplar. Tepat setahun kemudian, tanggal 26 Juni 1968 menjadi 44.400. Ini berarti penambahan tiap bulan pukul rata 1.146 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1969 (ketika harian ini membuka sebuah stand di Jakarta Fair) oplagnya meningkat menjadi 63.747 eksemplar. Tepat 26 Juni 1970 batas 80.000 telah dilewati. Tepatnya oplag *Kompas* telah mencapai 80.412 eksemplar. Dari jumlah itu, kira-kira 31.000 beredar di Jakarta saja. Ini berarti hampir 40%. Selebihnya (60%) tersebar di luar Jakarta, di seluruh Nusantara. Pola ini, menandakan bahwa *Kompas* menjadi harian nasional dan bukan harian lokal atau koran daerah, sudah ternyata sejak semula dan bertahan terus sampai kini. Setelah tahun 1980-an oplag *Kompas* mengalami perkembangan pesat, misalnya 600.000 tahun 1986 selama sebulan. Sekarang rata-rata 500.000 eksemplar (Senin-Jumat), sekitar 600.000 di hari Sabtu-Minggu. Oplag terbesar dicapai pada waktu ulang tahun Bung Karno ke 100 tahun dengan oplag 750.000 eksemplar dalam edisi khusus.

4. VISI DAN MISI KOMPAS

Moto "**Amanat Hati Nurani Rakyat:**" di bawah logo *Kompas*, menggambarkan visi dan misi bagi disuarukannya hati nurani rakyat. *Kompas* ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Ingin

berkembang sebagai “Indonesia mini”, karena Kompas sendiri adalah lembaga yang terbuka, kolektif. Ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Rumusan bakunya adalah “*humanisme transcendent*”. “Kata Hati Mata Hati”, pepatah yang kemudian ditemukan, menegaskan semangat empathy dan compassion Kompas.

4.1. Visi Kompas

“Menjadi Institusi Yang Memberikan Pencerahan Bagi Perkembangan Masyarakat Indonesia Yang Demokratis Dan Bermartabat, Serta Menjunjung Tinggi Asas Dan Nilai Kemanusiaan”

Dalam kiprahnya dalam industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Panca Sila melalui prinsip humanisme transcendent (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih spesifik bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka
- b. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi.
- c. Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok.
- d. Kompas adalah Koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa.
- e. Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.

4.2. Misi Kompas

“Mengantisipasi Dan Merespon Dinamika Masyarakat Secara Profesional, Sekaligus Memberi Arah Perubahan (*Trend Setter*) Dengan Menyediakan Dan Menyebarluaskan Informasi Terpercaya”.

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 5 sasaran operasional:

- a. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri : cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna.
- b. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.
- c. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip.
- d. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras.

- e. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan.

4.3. Nilai-nilai Dasar Kompas

Seluruh kegiatan dan keputusan harus berdasarkan dan mengikuti nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya
2. Mengutamakan watak baik
3. Profesionalisme
4. Semangat kerja tim
5. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya)
6. Tanggung jawab sosial
7. Selanjutnya, kita bertingkah laku mengikuti nilai-nilai tersebut, dengan begitu kita akan memberikan jasa yang memuaskan bagi pelanggan.

Nilai-nilai Dasar Kompas

Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya

Menghargai ide, pendapat dan saran orang lain.

Memberikan *feedback* yang membangun secara obyektif pada saat yang tepat.

Memberi dukungan atau tidak menghalangi orang lain untuk maju mencapai cita-citanya, serta dalam melakukan pekerjaannya dengan sempurna.

Bersikap tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan gender.

Menerima secara wajar adanya perbedaan pangkat, jabatan dan senioritas.

Tidak mencampuri masalah-masalah pribadi orang lain yang menyangkut hak asasinya.

Bersikap adil terhadap mitra kerja.

Peduli terhadap kepentingan orang lain.

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuannya masing-masing.

Tidak mengganggu suasana dan ketenangan bekerja.

Bersikap obyektif tanpa prasangka kepada prestasi atau hasil karya semua orang.

Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencoba ide baru dan tidak menghakimi apabila terjadi kegagalan.

Mengutamakan watak baik

Selalu mensyukuri rahmat Tuhan.

Bertingkah laku jujur, tidak menerima suap atau komisi, tidak korup, tidak kolusi dan nepotisme

Tidak berpihak dan tidak memihak.
Bertingkah laku yang pantas sesuai dengan perannya (*good profile*)
Tidak tinggi hati, congkak, iri, dengki, sirik, menfitnah dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar.
Saling membantu dan menghormati.
Bertindak disiplin dan rajin.
Bersikap saling terbuka.
Berkomitmen terhadap lembaga dan profesi.
Bersikap solider atau setia kawan.
Bersikap bijak dan prudent.
Seimbang dalam menggunakan pikiran dan perasaan.
Bertingkah laku yang sesuai dengan etika dan sopan.
Tulus dan ikhlas dalam memaafkan kesalahan/kekeliruan orang lain.
Bertingkah laku sesuai dengan perkataannya.
Bertanggung jawab terhadap segala tindakannya
Berani mengakui kesalahannya sendiri dan menunjukkan kesalahan orang lain.
Tidak membocorkan dan menyebarkan rahasia perusahaan.
Tidak memanipulasi segala tindakan, data, laporan, dll.

Profesionalisme

Memiliki kompetensi, baik dalam hal kepemimpinan atau manajerial maupun teknis yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Bertanggung jawab pada tugasnya.
Memiliki tingkat intelektualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan memiliki wawasan luas yang terkait dengan pekerjaannya
Berdedikasi pada profesi.
Melakukan perbaikan kinerja atau diri dan mengembangkan potensinya secara terus menerus.
Etos kerja yang tuntas (tidak berkerja setengah-setengah).
Berpikir dan bertindak kreatif, inovatif, taktis dan memiliki inisiatif.
Bersikap adil, obyektif dan berimbang.
Memiliki integritas.
Dapat membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi.
Menjalankan etika bisnis sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Bekerja secara sistematis sesuai dengan standar pekerjaannya.
Bertindak proaktif dalam mengantisipasi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Mengutamakan mencari inti permasalahannya dan menyelesaikannya terlebih dahulu, jangan mengutamakan mencari siapa yang bersalah atau menyalahkan orang lain.
Mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (efektif dan efisien).
Mengutamakan pelaksanaan tindakan nyata (*get things done*).
Berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak (*win-win solution*)
Berkomunikasi secara asertif dan responsif (tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dengan mengesampingkan hak pihak lain), tidak secara agresif (hanya mengutamakan haknya sendiri) dan submisif (haknya sendiri disalahgunakan pihak lain).

Semangat kerja tim.

Bekerja secara gotong royong.

Menjaga kemistri dan keharmonisan dalam pekerjaan.
Mengutamakan kepentingan yang lebih besar, tidak individualis maupun sektoral.

Peduli dengan persoalan orang lain.

Bekerja sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Melibatkan orang lain dalam proses bekerja bersama.

Bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan sinergi.

Bersaing dengan sehat.

Mendukung sportifitas dalam bekerja sama.

Menghindari unsur-unsur favorit terhadap salah satu orang atau bagian.

Tidak hanya mengutamakan hasil kerja, tetapi juga mengutamakan proses dalam bekerja sama.

Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan ketidak beresan baik dalam bagiannya maupun dalam lingkaran yang lebih besar lagi.

Bekerja secara institusionalisasi jangan personalisasi.

Menghindari ketergantungan pekerjaan pada individu tertentu.

Mendukung secara konsekuen dan konsisten keputusan yang telah diambil.

Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan segala sesuatu secara terbuka dan menghentikan segala isu-isu yang tidak baik.

Menumbuhkan sikap saling mempercayai satu dengan yang lain.

Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya)

Menangani keluhan konsumen secara cepat dan tuntas.

Memberikan pelayanan yang sempurna dari sudut pandang konsumen (*service excellence*).

Memberikan keramahan dalam melayani konsumen.

Melakukan pengamatan dan perbandingan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh pesaing.

Mendengarkan (jangan beramsumsi) dan merespon kebutuhan konsumen.

Menyediakan produk maupun pelayanan sesuai kebutuhan.

Memenuhi kepuasan konsumen adalah tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi.

Tanggung jawab sosial.

Peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain.

Menjaga citra perusahaan (tidak bertindak kriminal atau merugikan orang lain)

Mendukung kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kendilan sosial.

Mendorong setiap orang untuk berperan secara aktif dalam membantu masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

1. Berorientasi pada

2. Berorientasi pada

3. Berorientasi pada

4. Berorientasi pada

5. Berorientasi pada

5. Struktur Organisasi *KOMPAS*

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa, pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Umum dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis, lalu ada Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab bidang redaksi, dan Pemimpin Perusahaan yang bertanggung jawab bidang bisnis. Dibawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana dan dibawahnya terdapat Kepala Desk, Kepala Biro dan paling bawah adalah reporter. Di bidang bisnis, dibawah Pemimpin Perusahaan ada General Manajer Iklan dan General Sirkulasi, dan General Manajer *marketing communication*. Di antara dua bidang itu, ada bagian Penelitian dan Pengembangan, Direktorat SDM-Umum, dan Teknologi Informasi. Mereka sifatnya supporting dan dibawah supervisi Wakil Pemimpin Umum non bisnis, sementara untuk Pemimpin Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis..

Pembagian dalam Struktur Organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja. "Produk" Kompas yang dihasilkan itu merupakan hasil kerja sinergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi. Produk Kompas adalah Koran dan berita. Adapun tahap manajemen produk itu adalah sebagai berikut:

5.1. Bidang Redaksi

1). Perencanaan

Dilaksanakan rapat pagi dalam merencanakan berita yang akan dimuat, berdasarkan:

- a. Adanya undangan acara yang diterima Kompas.
- b. Peliputan berita yang ditetapkan di tiap-tiap desk.
- c. Penetapan *event* tertentu, dimana dalam upaya pencarian berita disesuaikan dengan aktualitas peristiwa yang terjadi.

2). Pengorganisasian

Redaktur mengkoordinasikan wartawan-wartawan untuk mencari dan menulis berita sesuai dengan yang direncanakan dalam rapat pagi dan menunjuk wartawannya untuk mengerjakan tugas-tugas pencarian berita tersebut.

3). Pelaksanaan

Dilaksanakan rapat sore untuk menetapkan berita yang akan dimuat dalam surat kabar (dalam bentuk yang belum jadi) dan membuat *head line* berita. Apabila data belum akurat maka akan ditambah atau dicari lagi. Setelah data berita akurat, berita disunting oleh desk sunting. Setelah disetujui, kemudian akan disunting dalam bentuk lay out Koran untuk dicetak. *Dead line* ditetapkan pukul 23.00. Percetakan dimulai pukul 01.00. Percetakan sesuai dengan jumlah oplag.

4). Pengevaluasian

Dilakukan evaluasi di tiap-tiap desk/bidang redaktur, selain mengevaluasi berdasarkan masukan dari pembaca yang menelepon atau mengirimkan fax/email. Evaluasi akan

dibahas pula dalam rapat Rabu (rapat mingguan) sebagai dasar perencanaan yang juga akan dibahas dalam rapat pagi. Evaluasi dilihat dari segi:

- Pencetakan susunan huruf dan kata-kata
- Bentuk dan susunan berita pada setiap halaman.
- Isi beritanya

Sumber berita lain selain wartawan dari penulis-penulis dan berbagai kantor berita. Kompas dikenal dengan keunggulan dari segi penulisan opini. Penulis opini Kompas, misalnya : Kwik Kian Gie, Mudji Sutrisno, Arief Budiman, Zuhairi Misrawi, Muhtadin AR, Aloysius Budi Nugroho, Herry Tjahjono dll. Pembagian berita: berita daerah, berita luar negeri, berita dalam negeri, berita olahraga dll.

5.2. Direktorat SDM-Umum

Hubungan kerja dan iklim dalam lingkungan mikro Kompas, yaitu: hubungan antar personal, sehari-harinya terjalin hubungan kekeluargaan, terbuka dan tidak kaku. Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi hubungan formal, berjenjang untuk menunjukkan fungsi kerja.

Promosi atau kenaikan pangkat karyawan berdasarkan: Penilaian dari sikap dan hasil kerja karyawan tersebut, jika dinilai cukup baik diberikan bahan dan dilatih agar naik jabatannya. Sebelumnya, karyawan tersebut mengalami prajabatan 6 bulan sampai 1 tahun. Jika karyawan itu tidak menunjukkan hasil kerja yang baik, maka tidak jadi naik pangkat. Pengangkatan manajer, jarang dilakukan oleh pihak luar, lebih sering dilakukan pihak dalam. Akhir-akhir ini bidang bisnis mulai mencoba dari luar (*head hunting*).

Peningkatan produktivitas karyawan dilakukan dengan cara: menerima wartawan dengan pendidikan sarjana bidang apa saja, kemudian dididik selama 1 tahun. Adanya orientasi karyawan baru mengenai visi, misi dan sejarah Kompas. Pelatihan Kepribadian. Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan yang meningkatkan kemampuan (*skill*) dan manajemen. Diadakan rekreasi pada bidang masing-masing, setiap 2 tahun sekali. Pemberian cuti dan tunjangan. Selain gaji pokok, diberikan uang transport, uang makan, bonus, THR. Kenaikan gaji karyawan berdasarkan inflasi ekonomi atau prestasi kerja yang baik, dengan penilaian karya.

Tujuan/sasaran manajemen adalah: memberikan informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, isi pemberitaan bersifat netral dan universal.

Direktorat SDM-Umum dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibawahnya ada empat manajer yang memimpin bidang Umum, Penerimaan & Penempatan, Remunerasi (Kesejahteraan), Pendidikan & Pelatihan.

1). Bidang Umum, berkewajiban menyediakan sarana & prasarana untuk setiap karyawan, agar mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Ruang kerja yang memadai dan peralatan kerja disediakan oleh perusahaan.

2). Bidang Penerimaan dan Penempatan, unit yang merekrut calon karyawan dan menempatkan di unit sesuai dengan bidang dan keahliannya. Perkembangan dari calon karyawan sampai pensiun menjadi tanggung jawab dari bidang Penerimaan dan Penempatan.

3). Bidang Kesejahteraan (Remunerasi), adalah unit yang mengurus kesejahteraan karyawan misalnya: tunjangan perumahan, cuti, sekolah, dokter, obat, rumah sakit dll.

4) Pendidikan & Pelatihan, unit yang mendidik & mempersiapkan calon karyawan untuk memasuki dunia kerja di bidangnya. Training untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau karyawan menjadi tanggung jawab dari unit ini.

5.3. Bidang Penelitian & Pengembangan

Kepala Penelitian dan Pengembangan yang kedudukannya sejajar dengan Pemimpin Redaksi (Pemred), bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin Umum Harian Kompas. Kepala Litbang membawahi 4 bidang yang mempunyai kedudukan sejajar, yaitu:

1). Pusat Informasi Kompas (PIK)

Pusat Informasi Kompas dipimpin oleh seorang Manajer membawahi tiga bagian:

- a. Bagian Akuisisi : bagian pengadaan dan perawatan bahan pustaka.
- b. Bagian Pengolahan Arsip Elektronik : bagian pengolahan arsip elektronik mencakup kegiatan pengolahan harian Kompas dan informasi dari sumber lain ke dalam bentuk elektronik.
- c. Bagian Layanan Informasi: bagian ini mempunyai kegiatan layanan informasi dan kegiatan sirkulasi.

Pusat Informasi Kompas merupakan satu unit/bidang yang pada dasarnya bertugas mengumpulkan, mengolah dan melakukan temu kembali informasi yang dibutuhkan. Kegiatan Pusat Informasi Kompas bukan hanya sebagai pusat dokumentasi, tetapi merupakan pusat informasi. Fungsi Pusat Informasi Kompas adalah untuk mendukung kinerja redaksi dalam menerbitkan harian Kompas, dan secara rinci mempunyai tugas:

- a. Mengembangkan koleksi baik buku, terbitan berkala dan data terolah.
- b. Mengelola arsip harian Kompas dan beberapa terbitan berkala yang dipilih berdasarkan kebutuhan redaksi ke dalam bentuk arsip elektronik.
- c. Memberikan informasi untuk internal yaitu: wartawan dan karyawan yang tergabung dalam Kelompok Kompas – Gramedia (KKG) dan melayani masyarakat umum.

2). Pusat Penelitian Kompas (Puslitkom)

Pusat penelitian Kompas (Puslitkom) dipimpin seorang Manajer, bertugas menangani penelitian dari hasil kerja redaksi yang hasilnya diserahkan pada bagian redaksi. Penelitian dilakukan dengan bantuan dari mahasiswa dengan mengadakan polling terhadap pelanggan Kompas dan masyarakat umum.

3). Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis)

Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis) dipimpin oleh seorang Manajer Puslitbis, menangani riset pasar / konsumen, memantau pendapat masyarakat terhadap perubahan Kompas, dan mengadakan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan Kompas. Forum Pembaca Kompas yang ditangani selama ini untuk memberi masukan / kritik tentang harian Kompas.

4). Bidang Database

Updating database Kompas perlu ditangani setiap kali agar koleksi database harian Kompas selalu *up-to-date*. Bidang Database Kompas dipimpin oleh seorang manajer Database. Biodata tokoh-tokoh politik, pengusaha, artis dan orang-orang terkenal selalu di *update* sehingga datanya tetap relevan menjadi tanggung jawab dari unit ini. Database juga setiap kali memuat profil kabupaten seluruh Indonesia. Buku otonomi daerah dengan isi profil kabupaten telah terbit , dan telah menyusun buku partai Indonesia.

5.4. Bidang Teknologi Informasi

Bidang paling baru dalam organisasi Kompas, ini didirikan tahun 1996 dan direstrukturisasi tahun 2003, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknologi informasi dengan cepat dan tepat, serta bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh karena itu, Bidang Teknologi Informasi (TI) diarahkan untuk lebih berorientasi pada memberikan pelayanan yang tuntas (*end-to-end services*) dalam bidangnya, dan tidak hanya berorientasi pada teknologi saja. Untuk mewujudkan hal ini, maka Bidang TI membentuk tim kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ada tim yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan jasa layanan dan ada tim yang bertanggung jawab untuk men-deliver layanan tersebut. Kedua tim ini bekerja secara proyek maupun rutin, dan didukung oleh Senior Analyst, Staf Sekretariat, Administrasi dan Gudang. Secara struktur, tim kerja ini dibangun dari tiga bidang keahlian yang dipimpin oleh seorang General Manajer, dan masing-masing bidang keahlian dipimpin oleh seorang Manajer, yaitu Software & Aplikasi, Hardware & Infrastruktur dan Helpdesk & Support.

1). Software dan Aplikasi (SA)

Bidang SA diisi oleh para programmer dan system analis yang bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan software, aplikasi dan database menjadi suatu sistem informasi yang diperlukan. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, mudah digunakan, bebas dari kesalahan dan *cost effective*. Untuk itu bidang SA dituntut untuk memiliki metoda kerja yang sistematis dan melaksanakan penelitian yang terarah. Bekerjasama dengan bidang lain, bidang SA memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan software dan aplikasi, serta memastikan bahwa database perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

2). Hardware dan Infrastruktur (HI)

Bidang HI bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan hardware dan infrastruktur untuk menjalankan sistem informasi yang diperlukan. Para ahli hardware dan jaringan komputer serta telekomunikasi di bidang ini juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu, handal dan *cost effective*. Sama dengan Bidang SA, Bidang HI juga memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan hardware dan infrastruktur, serta memastikan bahwa hardware dan infrastructure komputer & telekomunikasi perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

3). HelpDesk dan Support (HDS)

Bidang HDS merupakan ujung tombak TI dalam men-deliver layanan TI, serta menangkap kebutuhan dan kesulitan para pengguna sumber daya TI di perusahaan. Oleh karena itu secara proaktif Bidang HDS melaksanakan inventarisasi, instalasi, perawatan, perbaikan dan dukungan teknis, serta memberikan pelatihan agar sumber daya TI perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bidang HDS disebar ke

beberapa lokasi kerja dan masing-masing dikepalai oleh seorang Supervisor. Secara regular mereka menghadiri dan mengadakan pertemuan dengan user.

5.4. Bidang Bisnis

Masyarakat Indonesia semakin beragam pola dan gaya hidupnya. Komunikasi massa di Indonesia semakin maju, dan jaringan informasi semakin canggih. Akibatnya, terjadi peningkatan kualitatif kebutuhan informasi. Artinya, sekarang bukan sekadar membutuhkan fakta saja, tetapi petunjuk yang lebih mengarah pada makna dari fakta itu, bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Atas dasar pemikiran itu ada gagasan, dalam usaha penerbitan Kompas mulai dikembangkan pemikiran yang tidak hanya didasarkan pada orientasi produk, tetapi bergerak sampai jarak tertentu ke orientasi pasar. Artinya, dalam membuat produk ditingkatkan kesadaran dan pemikiran terhadap situasi pasar, maupun perkembangan kebutuhan konsumen mengenai informasi.

Fungsi Bisnis :

- Bertanggung jawab dan berkewajiban menjadikan lembaga Kompas menjadi badan usaha komersial yang sehat.
- Mengatur pendapatan dan pembiayaan kegiatan usaha, agar media sebagai produk laku terjual.
- Memantapkan agar unit bisnis dan personilnya sebagai intitusi sosial yang punya nilai ekonomis dan kemasyarakatan.
- Mengedarkan produk agar bisa dikonsumsi pada saat pembaca membutuhkannya.

Sumber:

1. Profil Harian *Kompas*, Database Pusat Informasi Kompas
2. "Kompasiana" oleh PK Ojong, Jakarta : Gramedia , 1981
3. Frans Seda, "Sepanjang Jalan kenangan", Kompas, 28 Juni 1990, hal. IV
4. St. Sularto, Kompas: Sahabat dalam Perubahan, HUT Kompas ke -35
5. Orientasi Karyawan Baru, Artikel Sejarah Ringkas Kompas, PSDM Kompas.
6. Hidup Sederhana Berpikir Mulia, P.K. Ojong, Satu dari Dua Pendiri Kompas, oleh Helen Ishwara, Penerbit Buku Kompas, September 2001.

SANTARA



Gerakan tari pendet di Taman Budaya Denpasar, Bali, Sabtu (22/8). Aksi itu merupakan bentuk protes atas berita klaim tari itu oleh pihak Malaysia. Seniman Bali mendesak pemerintah memprotes hal itu.

KLAIM TARI PENDET

Bung Karno Mendukung Pemassalannya...

Oleh **BENNY DWI KOESTANTO**

Polemik berita perihal klaim tari pendet oleh Malaysia terjadi lagi beberapa hari terakhir ini. Warga Indonesia di situs jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook, berusaha "memngeri" tari itu sebagai tarian Tanah Air, khususnya Bali. Seniman Bali pun mendesak pemerintah segera mengajukan nota protes kepada Pemerintah Malaysia yang kekurangan identitas itu...

"Pemerintah jangan abai lagi. Selain menginventarisasi produk kebudayaan Nusantara yang begitu kaya ini, pemerintah harus tanggap dengan aneka pengakuan atau klaim sepihak oleh pihak lain atas produk-produk kebudayaan kita," kata Ida Ayu Agung Mas, tokoh masyarakat di Bali yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Bali itu. Sabtu (22/8). Ia merujuk kasus-kasus sebelumnya yang menimpa aneka produk kebudayaan, seperti batik, lagi "Rasa

Sayang", dan reog Ponorogo. Akan tetapi, Masehara kok di-sia-siakan?

Dua penari cilik dan seorang penari setengah huya memunjukkan aneka gerakan tari pendet di taman Taman Budaya Bali, kemarin. Turut mendampingi Dayu Mas, demikian Ida Ayu Mas biasa dipanggil, sejumlah seniman Bali. Salah satunya adalah seniman yang juga pengajar ISI Denpasar, Prof Wiyun Dibia. Mereka mengukir gerah karena tari pendet ikut ditampilkan di iklan program *Visit Malaysia 2009* itu.

Dayu Mas menyatakan, dirinya akan mendesak DPD segera mengajukan nota protes ke Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. "Nota protes langsung dikirim via e-mail ataupun faksimile Sabtu ini. Paling tidak, Senin nanti langsung akan ditandatangani secara langsung ke Kedubes Malaysia," kata Dayu Mas.

Dibia menyatakan, tari pendet adalah kesenian tradisional yang telah menjadi bagian dari tradisi budaya Hindu-Bali sejak ratusan tahun yang lalu. Pada awalnya tarian ini hanya dikenal sebagai tarian religius yang disajikan dalam upacara keagamaan yang berfungsi sebagai tari wali dalam upacara piodalan (Dewa Yadnya) di pura-pura. Tarian biasanya disajikan dalam bentuk berpasangan atau kelompok oleh penari perempuan (anak-anak, remaja, dewasa). Setiap penari membawa mangkok perak (bekor) berisi bunga warna-warni. Pada akhir tarian, para penari membariskan bunga ke arah penonton, sebagai ungkapan dan ucapan selamat datang. "Baru pada awal tahun 1960-an, sejumlah koreografer Bali mengubah tari pendet untuk penyambutan wisatawan, disebut Tari Pendet Puja Astuti. Tari pendet itu dapat dikatakan sebagai tari penyambutan tertua di Bali," kata Dibia.

Tradisi Memendek, menari-

kan tari pendet, sudah sejak lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu di Bali. Hingga kini tarian pendet masih tetap disucikan di Bali dan menjadi salah satu sumber inspirasi bagi penciptaan tari-tarian baru. Di beberapa daerah di Bali juga, di kenal tari beris pendet, satu varian tari beris (kelompok) yang dihayakan oleh penari laki-laki.

Salah satu tonggak bersejarah tari pendet adalah penciptaan tari pendet massal tahun 1962 oleh I Wayan Bertha dan kawan-kawan dengan jumlah penari sekitar 800 orang. Tarian itu dipersiapkan untuk upacara pembukaan Asian Games di Jakarta. Presiden Soekarno kotilks itu ikut mendorong proses penciptaan tari pendet massal ini. Di masa-masa selanjutnya, publik pun semakin mengenal tari pendet adalah identik dengan tari selamat datang yang menampilkan dara-dara ayu berbusana adat Bali.

Soal Tari Pendet Diselesaikan di EPG

Wakil Duta Besar Malaysia Dipanggil

JAKARTA, KOMPAS – Berkaitan dengan tari pendet, hasil budaya Indonesia yang dijadikan iklan pariwisata Malaysia, Pemerintah Indonesia akan melakukan protes. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap masalah itu bisa diselesaikan melalui *eminent person group* Indonesia-Malaysia.

"Yang jelas sudah ada *eminent person group* (EPG). Jadi Malaysia dan Indonesia mestinya, jika ada hal-hal semacam ini, bisa menyelesaikannya melalui EPG," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8).

EPG Indonesia terdiri atas Jenderal (Purn) Try Sutrisno (Ketua), Quraish Shihab, Musni Umar, dan Des Alwi Abubakar. Tujuan dari pembentukan EPG Indonesia dan Malaysia, menurut Juru Bicara Kepresidenan Dito Patti Djalal, untuk mengkaji hubungan kedua negara secara keseluruhan dan mempelajari masalah-masalah yang kerap timbul di antara kedua negara.

Presiden Yudhoyono hari Selasa ini dijadwalkan akan menerima laporan resmi dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.

"Kalau tari pendet, semua orang sudah tahu itu berasal dari Bali. Mana mungkin itu dari tempat lain. Kalau tari Melayu, mungkin ada *share culture*. Namun, kalau tari pendet, ya enggak ada certitanya bukan dari Bali," ujar Andi.

Diantar langsung

Secara terpisah, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, surat protes kepada Pemerintah Malaysia diantarkan langsung ke Kuala

Lumpur, Senin siang. Wakil Duta Besar Malaysia di Indonesia Amran Mohamed Zain pun sudah dipanggil dan ditegur.

"Surat protes akan diantar langsung dengan didampingi Duta Besar RI di Malaysia ke Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia," kata Jero Wacik.

Seperti diberitakan, penanyangan tari pendet dalam iklan "Enigmatic Malaysia" di saluran televisi Discovery Channel untuk pariwisata Malaysia telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Tanah Air. Bahkan, di Bali, puluhan seniman, Sabtu (22/8), melakukan protes. Protes dipimpin guru besar Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Wayan Dibia. Protes ini disampaikan kepada Ida Ayu Agung Mas, anggota Dewan Perwakilan Daerah, di Taman Budaya Denpasar.

Menurut Dibia kepada pers, tari pendet merupakan warisan budaya Bali secara turun-temurun. Berdasarkan pengamatan Dibia, penari pendet dalam iklan

tersebut merupakan alumnus ISI Denpasar yang bernama Lusla dan Wwik, Pengambilan gambar dilakukan dua tahun lalu.

Menurut Wacik, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah mempunyai perjanjian bilateral untuk menangani setiap sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat tahun 2007.

Ini terjadi setelah tahun 2007 lagu "Indang Sungai Garing-giang" ciptaan Tiar Ramon dari Minangkabau digunakan oleh delegasi kesenian Malaysia pada Asia Festival 2007 di Osaka, Jepang. Kemudian "Rasa Sayange" asal Maluku digunakan untuk *jangke* Visit Malaysia 2007. Kemudian, klaim Reog Ponorogo di situs web pariwisata Malaysia.

"Untuk mata budaya yang *grey area*, kedua pihak sepakat saling memberi tahu dan meminta izin apabila digunakan dalam iklan komersial di setiap negara," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.

(JNU/NAL/BEN)

Presiden Iunggu Niat Baik Malaysia

Harus Minta Maaf atas Penggunaan Tari Pendet untuk Iklan

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memunggu niat baik Pemerintah Malaysia terkait penggunaan tari pendet yang tidak patut untuk promosi wisata Malaysia. Protes yang dilayangkan ke Malaysia dinilai tidak berlebihan karena Malaysia sudah berkali-kali melakukannya.

"Ini pelajaran yang sangat baik. Dan saya sekali lagi berharap niat baik Indonesia untuk menjaga hubungan baik ini juga dimiliki Malaysia untuk melakukan hal yang sama sehingga kerja sama yang baik di banyak bidang jangan terganggu dengan hal-hal seperti ini," ujar Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (25/8).

Sebelum jumpa pers, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sufi Silalahi menerima laporan dan penjelasan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Jero Wacik mengemukakan telah melayangkan protes dan mendapat jawaban yang belum memuaskan.

"Bagaimanapun, saya berharap Pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia. Kejadian ini bukan yang pertama kali," ujar Presiden.

Terdapat klaim budaya Indo-

nesia dan budayawan menggelar unjuk rasa menuntut pemerintahan secara resmi dari Pemerintah Malaysia. "Tidan tersebut melambatkan bangsa Indonesia," kata Dayu, salah satu koordinator aksi. Sejumlah poster dan spanduk berisi kecaman terhadap Malaysia juga dibentangkan.

Di Jayapura, Gubernur Di Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, untuk menghormati terjadinya klaim negara lain terhadap produk-produk kebudayaan nasional, Indonesia perlu segera mematenkan produk kebudayaan itu di lembaga paten dunia yang diakui secara internasional. Jika tidak, klaim oleh negara lain kemungkinan akan terus terjadi.

"Perlu mematenkan pada lembaga paten internasional di Austria. Kalau mematenkannya di Indonesia, ya paten itu hanya berlaku di Indonesia," kata Sultan Hamengku Buwono X.

Mematenkan produk budaya, lanjut Sultan, memang tidak mudah karena penciptanya sering kali tidak diketahui. Meski demikian, paten produk kebudayaan tetap bisa dilakukan dengan mematenkan pemerintah daerah. Ia memcontohkan, Pemerintah Provinsi DIY telah mematenkan 300 desain batik gaya Yogyakarta.

Kalau mematenkannya di Indonesia, ya paten itu hanya berlaku di Indonesia.

Indonesiata.

Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menyatakan, seluruh dunia tahu bahwa tari pendet berasal dari Bali, bukan dari Malaysia. Sesuai jeleranya, Pemerintah Provinsi Bali telah mengirim surat kepada pemerintah pusat agar bersikap tegas dalam menangani persoalan ini.

Seni dan budaya daerah

Di Bandung, Komunitas Pensa-

dan

nya
an
tata
pen

PE
D
K

JAI

row
Bek
(25
bak
dan
(Pe
sia).

lalu
tata
seju
pa f
F
Lap
pan
tem
nya
ora
Bur
Bah
kan
dar
diny
berl
bebi
laka
Soal
terr
kan
Mal
E

me-

CIUTI/RENSI/CHIE/RENSI

Perlindungan Budaya Lemah

(Sambungan dari halaman 1)

pemerintah kerajaan di negara bagian juga sangat antusias menerbitkan berbagai buku.

Dalam buku "Spirit of Wood" *The Art Malay Woodcarving*, yang merupakan seni budaya yang berkembang hanya di wilayah Kelantan, Terengganu, dan Pattani, misalnya, diulas berbagai seni ukir kayu, pembuatan keris, gunungan wayang, mebel, hiasan dinding, arsitektur rumah, dan perkakas rumah tangga lainnya.

Hal serupa diulas dalam buku seni lainnya yang diterbitkan Malaysia, baik menyangkut keris, batik, arsitektur, tari, maupun kesenian rakyat. Tak sekadar buku, berbagai dokumentasi seni juga dipublikasikan lewat internet

dan video cakram padat (VCD).

Tak dapat dimungkiri, isi buku itu banyak kesamaan dengan buku terbitan Indonesia, seperti *Ensiklopedi Wayang Indonesia*, *Ensiklopedi Keris, Performing Arts Indonesian Heritage*, dan *Indonesia Indah* yang meliputi *Teater Tradisional Indonesia, Batik, Tenun Indonesia, Tari Tradisional, Kain-kain Nontenun Indonesia*, dan buku lainnya.

"Tidak mengherankan, karena antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif budaya ada warisan bersama atau *shared heritage*," kata mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo. Hal ini juga pernah diungkap dalam Seminar Imaging Asia di Universitas Nanyang, Singapura, beberapa tahun lalu.

Karena itu, terkait persoalan tari pendet, sebenarnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk melakukan introspeksi diri.

Menurut Sardono, sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi global yang kini mengarah pada industri kreatif, Malaysia juga mengembangkan ekonomi berbasis industri kreatif. "Bahkan secara ekstrem mereka bisa memisahkan hal yang bersifat profan (duniawi) dengan yang transenden (berkaitan dengan komunikasi dengan Tuhan)," ujarnya.

Dia menyarankan agar Indonesia segera berbenah dan mulai memilah-milah mana produk kebudayaan yang merupakan identitas kebudayaan nasional dan mana yang dapat masuk ke dunia industri. (TIM KOMPAS)



Terkait dengan krisis idan tari pendet, Keluarga Mahasiswa Hindu Universitas Gadjah Mada bersama Keluarga Putra Bali Puruntara Yogyakarta menggelar Aksi Damai Tari Pendet Massal di Monumen Tapak Prostitusi Kota Yogyakarta, Minggu (30/8). Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mereka untuk menjaga tari pendet sebagai warisan budaya adiluhung bangsa Indonesia.

Produk Budaya Mendesak Dilindungi

Terus Dimainkan dan Lakukan Regenerasi

JAKARTA, KOMPAS – Peristiwa penggunaan tari pendet dalam iklan pariwisata Malaysia semestinya menggugah pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bergerak melakukan perlindungan dan mengembangkan produk seni dan budaya sebagai salah satu industri kreatif.

Demikian benang merah pendapat yang dikemukakan oleh mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo dan Penjabat Rektor Institut Seni Indonesia Sarakarta Prof Dr T Slamet Suparno.

Keduanya sependapat, upaya perlindungan seni budaya di antaranya dilakukan melalui pendidikan kepada generasi muda.

Sardono menyoroti bahwa kebudayaan yang berkembang di kawasan Asia sekarang sebenarnya merupakan warisan bersama (*shared heritage*) sehingga perlu ada pemahaman bersama agar

pada masa mendatang tak terjadi rebutan warisan antarbangsa.

Dia mengatakan, "Indonesia harus segera memilah-milah dengan jelas kapan produk kebudayaan itu masuk ke ranah identitas nasional, kapan merupakan alat pendidikan, dan kapan masuk ranah industri kreatif."

Menurut dia, kasus tari pendet bagi Malaysia ada di ranah industri, yaitu idan pariwisata. Padahal, bagi Indonesia itu merupakan salah satu identitas kebudayaan (*cultural identity*).

Sementara Slamet menegaskan perlunya produk seni budaya

ditanamkan kepada generasi muda saat ini dan mendarang lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal.

"Kalau menuntut murid jadi tahu tentang budaya, garunya harus mempelajari seni budaya. Tanpa begitu, bagaimana kita mewariskan budaya kepada generasi berikutnya," paparnya.

Inkubator

Menurut Sardono, Indonesia sudah mendirikan model inkubator inovasi buat industri kreatif dengan sistem yang lengkap.

"Sudah ada Akademi Jakarta, sebuah kumpulan pujangga, semacam dewan para empu," ujarnya. Anggota Akademi Jakarta adalah pemikir dan budayawan. "Ketuanya pun bukan seniman, yaitu Taufik Abdullah, dengan anggota-anggota Rosihan Anwar, Syaefi Ma'arif, Goenawan Mohamad," lanjutnya. Sistem itu didirikan mantan Gubernur DKI

Jakarta Ali Sadikin.

"Di bawahnya ada Dewan Kesenian Jakarta sebagai forum praktisi seni kreatif dan Taman Ismail Marzuki sebagai pengelola infrastruktur untuk orang pentas, lalu dilengkapi dengan pendidikan seni, yaitu Institut Kesenian Jakarta. Ini sebuah model yang bagus," katanya.

Slamet menegaskan, salah satu upaya manjur adalah dengan menambes jaringan teknologi informasi. "Teman-teman yang memiliki kompetensi dan latar belakang sejarah kuat harus menulis artikel tentang seni budaya Indonesia. Upload di situs jaringan dan publikasikan lewat internet sehingga dunia internasional tahu," ujarnya.

Jika artikel itu didukung dengan data sejarah, penelitian, sumber, dan referensi jelas, Slamet yakin, negara lain tidak akan seenaknya mengklaim itu sebagai karya mereka. (SW/SON)

RI Sesalkan Aksi "Sweeping"

Dubes RI di Malaysia Dipanggil Kemlu Malaysia

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia agar pemerintah negeri jiran itu memahami sensitivitas sejumlah isu yang dapat mengganggu hubungan baik Indonesia-Malaysia.

Meskipun tidak selalu menyangkut persoalan prinsip, isu sensitif berpotensi membangkitkan sentimen negatif masyarakat.

Presiden Yudhoyono menekankan hal itu ketika menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9).

"Menteri Luar Negeri agar menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia untuk betul-betul mengetahui sensitivitas terhadap isu-isu tertentu supaya tidak ada reaksi yang berlebihan. Biasanya, kita bereaksi terhadap sesuatu yang menurut kita tidak semestinya itu terjadi. Saya kira perlu disampaikan pesan yang terang dengan bahasa yang baik, tetapi juga tegas, bahwa ini demi menjaga hubungan baik kita, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

Menurut Presiden, sejumlah isu, antara lain penggunaan tari pendet dari Bali dalam iklan pariwisata Malaysia serta klaim terhadap beberapa produk budaya Indonesia, sebenarnya bukan tergolong persoalan prinsip, melainkan sensitif. Persoalan yang dinilai prinsip antara lain masalah batas negara, karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa.

Soal "sweeping"

Terkait sejumlah isu sensitif, Presiden juga meminta masyarakat tidak merespons dengan melakukan tindakan eksemif atau berlebihan, apalagi melawan hukum, misalnya dengan melakukan *sweeping* terhadap warga negara Malaysia.



'Sweeping' bukan langkah yang terbaik, tetapi justru memunculkan masalah baru.

"*Sweeping* bukan langkah yang terbaik, tetapi justru memunculkan masalah baru. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan tugasnya, kita melakukan protes, aksi diplomatik. Pemerintah bekerja, Eminent Person Group juga bekerja, jadi tidak perlu ada tindakan-tindakan yang berlebihan," ujar Presiden.

Eminent Person Group dibentuk Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, ketika itu Abdullah Badawi, untuk mengelola, memelihara hubungan baik, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kedua negara.

Terkait aksi *sweeping* warga Malaysia yang terjadi sekitar dua jam di sekitar Jalan Diponegoro itu, Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membenarkan bahwa Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar, Rabu (9/9), telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Pada pertemuan itu, seperti juga dilaporkan Bernama, Menlu Malaysia Anifah Anam menyampaikan posisi Malaysia terkait be-

berapa isu yang membuat hubungan kedua negara agak tegang. Termasuk di antaranya aksi *sweeping* terhadap warga Malaysia di Jakarta, yang menurutnya bisa memicu konflik antara rakyat kedua negara.

Wajar bermasalah

Menyangkut hubungan kedua negara, Presiden Yudhoyono mengingatkan, karena Indonesia dan Malaysia bertetangga dekat, mitra utama, dan bangsa serumpun, wajar jika kerap muncul masalah.

"Kalau dengan negara di Eropa Barat atau Amerika Latin atau Afrika tidak pernah ada masalah, itu lebih karena jarang bertemu, jarang berinteraksi, dan lain sebagainya," ujarnya.

Presiden menutarikan, penyelesaian yang baik atas beragam permasalahan yang muncul dalam hubungan Indonesia-Malaysia juga amat diharapkan oleh 1,8 juta warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia untuk bekerja atau studi.

Menyangkut klaim Malaysia atas produk budaya Indonesia, Presiden mengatakan, pemerintah juga memperjuangkan melalui upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dicontohkan Presiden, pada 2 Oktober nanti, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) akan menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Dua produk budaya yang sudah lebih dulu diakui UNESCO berasal dari Indonesia adalah wayang (2003) dan keris (2006).

"Ini cara yang paling baik. Pemerintah terus berupaya, setelah wayang, keris, dan sebentar lagi batik menjadi warisan budaya dunia asal Indonesia. Masih ada lagi *angklung*, *sasando*, dan sebagainya. Rakyat harus memahami bahwa pemerintah juga terus bekerja untuk itu," kata Presiden. (OKI/DAY)

Presi
Jakar

KA:
P

JAK.
perso
Balib
tralia
Bant
tanga
meng
mor
sia ju
ngan
soal:
Bal
sus te
asing
1975:
tara I
"Te
mem
Five l
ngat l
Sena
Leste
yang
dua
mem
Trot
ujar I

Hubungan RI-Malaysia Sulit

"Pencaplokkan" Tarian Pendet Termasuk Menjadi Penyebab

JAKARTA, KOMPAS — Hubungan bilateral RI-Malaysia kini memasuki babak sulit yang ditandai dengan munculnya beberapa persoalan yang mengganggu. Indonesia mengedepankan jalur diplomasi, perundingan, atau komunikasi politik sehat agar semua masalah bisa diselesaikan.

"Mengelola hubungan kedua negara memang sulit. Komunikasi politik yang kita lakukan sudah di era yang berbeda. Generasi baru melihat (hubungan) itu lebih rasional dan para orang tua dulu melihat kedua negara sebagai serumpun," katanya.

Beberapa persoalan muncul setelah klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, terutama dalam kasus tarian pendet Bali.

Hal ini ditambah lagi dengan persoalan dari sisi Indonesia. Misalnya, ada aksi *sweeping* terhadap warga Malaysia, pembakaran bendera dan atribut negara tetangga itu, serta unjuk rasa di Jakarta. Ada juga kasus rumah

kontrakan mahasiswa Malaysia di Yogyakarta dilempari dengan telur busuk.

"Deplu mengancam tindakan *sweeping* ini karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Namun, aksi ini hanya dilakukan sekelompok kecil warga, bukan mewakili rakyat kita. Kita harus memaknai jahur diplomasi dengan arif, bijak, dan damai," kata Teuku.

Menlu akan bertemu

Saat jumpa pers, Teuku menyatakan, Malaysia prihatin dan mencermaskan keselamatan warganya di Indonesia. Kecemasan itu antara lain ditunjukkan Menteri Luar Negeri Malaysia YB Datuk Anifah Haji Aman yang sampai memanggil Duta Besar RI untuk Malaysia Da'if Bachktiar di Kuala Lumpur, Rabu lalu.

"Kita menjelaskan Indonesia melindungi semua warga asing.

termasuk warga Malaysia," jelas Teuku lagi.

Dalam rangka mengelola kembali hubungan baik antarkedua negara, Menlu Malaysia berinisiatif menemui Menlu RI Hassan Wirajuda pada hari Kamis yang akan datang. "Beliau berinisiatif datang ke Indonesia dan akan diterima Bapak Menlu kita. Keduanya akan membahas isu-isu terkini terkait banyak hal. Bagaimana seharusnya kedua negara ini mengelola hubungan bilateralnya," jelas Teuku.

Masalah yang akan menjadi fokus pembicaraan kedua pejabat tersebut, kata Teuku, belum dapat dirincikan. Meski demikian, kemungkinan besar beberapa isu sensitif akan menjadi fokus pembicaraan, mungkin juga termasuk soal isu *sweeping* warga, pembakaran atribut Malaysia, dan klaim produk budaya Indonesia yang dilakukan negara tetangga itu.

Saat ini sudah terbentuk ke-

lompok tokoh terkemuka atau Eminent Person Group (EPG) Indonesia-Malaysia. Kelompok ini mengkaji hubungan kedua negara secara keseluruhan dan mempelajari masalah-masalah yang menjadi akar kian memanasnya hubungan antarkedua negara untuk disikapi pimpinan negara masing-masing.

Di samping berbagai isu tersebut, hubungan RI-Malaysia juga sering panas, terutama di kalangan rakyat Indonesia. Tidak sedikit kasus penyiksaan pekerja rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pengusiran bahkan penyiksaan juga dilakukan aparat Malaysia terhadap tenaga kerja ilegal asal Indonesia.

Namun, di sisi lain, perusahaan Malaysia penampung pekerja ilegal asal Indonesia sepertierti mendapat angin. Perusahaan sering menahan atau tak membayar gaji dengan alasan status sebagai pekerja ilegal. (DAY/CAL)

Hindari Klaim Sepihak

Menlu Malaysia Menegaskan Tari Pendet Milik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menghindari klaim kepemilikan sepihak terhadap produk budaya serumpun atau cenderung universal. Klaim seperti itu sangat sensitif dan tidak boleh terjadi lagi.

Demikian dikatakan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dalam konferensi pers sesuai permintaan kunjungan Menlu Malaysia Datuk Anifah Aman, Kamis (17/9) di Jakarta. Pada saat Hassan memberi penjelasan tersebut, Anifah yang berdiri di sampingnya tersenyum sambil mengungkapkan angguk-anggukan kepala.

RI-Malaysia sepakat berupaya mengurangi isu negatif yang dapat mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin sejak berabad-abad. Salah satu isu sensitif yang harus dihindari adalah kla-

Malaysia," kata Hassan lagi.

Ada kekhilafan

Indonesia, kata Hassan, sudah meminta Malaysia memberikan klarifikasi resmi atas kasus tari pendet. Hal itu sudah dilakukan di tingkat pejabat senior kedua negara dan menteri, termasuk antarmenteri pariwisata dan budaya dua negara bertetangga itu.

"Sudah ada kesepakatan yang baik untuk menghindari agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi," kata Hassan menjelaskan.

Anifah menambahkan, warga Indonesia sangat banyak dan berkembang di Malaysia, demikian juga produk budayanya sejak dari nenek moyang dahulu.

"Budaya yang diwarisi sangat kental. Dalam kasus tari pendet, kami setuju bahwa itu milik Indonesia. Pemerintah dan rakyat

Malaysia tidak pernah mengklaim sebagai milik. Ini hanya sebuah kekhilafan yang dibuat Discovery Channel," kata Anifah.

Menurut dia, Malaysia bangga melihat banyaknya produk budaya Indonesia yang diperkenalkan di luar negeri, termasuk di Malaysia. "Ada banyak persamaan dan tidak seharusnya dipermasalahkan. Semuanya dapat kita rundingkan," ungkap Anifah.

Hal lain yang juga disinggung dalam pertemuan adalah soal tenaga kerja Indonesia (TKI). Kata Anifah, pemerintahnya sudah menegur perusahaan (perkebunan) yang bertindak tidak adil terhadap TKI.

Menlu Malaysia juga mengakui bahwa tenaga kerja asing termasuk TKI, telah meningkatkan produktivitas ekonomi negerinya. (CAL)